

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
PROGRAM BINA LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi multi situs di SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung)**

Tesis

Oleh

RAFIKA TRISHA ANANDA



**PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT PROGRAM IMPLEMENTATION POLICIES GOVERNMENT IN BANDAR LAMPUNG

By

RAFIKA TRISHA ANANDA

The purpose of this study was to determine and analyze the extent to which government policies for environmental development program Bandar Lampung implemented in schools in the city of Bandar Lampung. This type of research is the description with a qualitative approach. The results of this study is to describe findings in the field based on the research focus of the new admissions system through community development programs and application of regulations for environmental development program in the school SMPN 1 and SMPN 12 Bandar Lampung. Information obtained from the process of observation, documentation and interviews are expected to provide an overview of how the policy implementation environment, The result showed : each school has a different system in the new admissions process is in adjust to the needs and abilities of school, each school has a strategy in new admissions, including in terms of placement classes, it is intended that the school not only provide opportunities to disadvantaged families in order to continue the education for their children so that they can enjoy the process of education in school but the school can maintain quality, besides that depicted on the learning process carried out by the teachers in the school.

Keywords: policy, community development, learners.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

RAFIKA TRISHA ANANDA

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kebijakan pendidikan program bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan multi situs yang dilakukan di SMPN 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi/penarikan kesimpulan. Sumber data adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, orang tua, dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan : (1) setiap sekolah memiliki sistem yang berbeda dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah, (2) masing-masing sekolah memiliki strategi dalam memenuhi kuota 50% penerimaan peserta didik baru termasuk dalam penempatan kelas, hal ini dimaksudkan agar sekolah bukan hanya memberikan kesempatan kepada anak guru dan anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan namun sekolah dapat mempertahankan mutu, (3) faktor pendukung diantaranya keinginan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk pemerataan pendidikan dan hambatan pelaksanaan diantaranya sarana prasarana penunjang dan motivasi belajar peserta didik yang rendah.

Kata Kunci: kebijakan, bina lingkungan, peserta didik

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
PROGRAM BINA LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi multi situs di SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung)**

Tesis

Oleh

RAFIKA TRISHA ANANDA

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
MAGISTER PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi S2 Magister Manajemen Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
PROGRAM BINA LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Multi Situs di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 12
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rafika Trisha Ananda**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1423012017

Program Studi : Manajemen Pendidikan

Jurusan : Ilmu Pendidikan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.
NIP 19600315 198503 1 003

Dr. Alben Ambarita, M.Pd.
NIP 19570711 198503 1 004

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan

Ketua Program Studi
Magister Manajemen Pendidikan

Dr. Riswanti Rini, M.Si.
NIP 19600328 198603 2 002

Dr. Irawan Suntoro, M.S.
NIP 19560323 198403 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

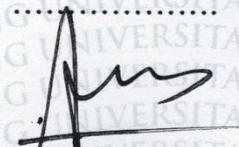
Ketua : **Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.**



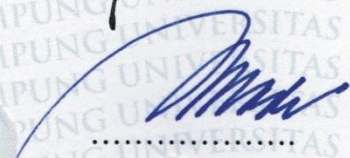
Sekretaris : **Dr. Alben Ambarita, M.Pd.**



Penguji Anggota : I. **Dr. Abdurrahman, M.Si.**



II. **Dr. Sumadi, M.S.**



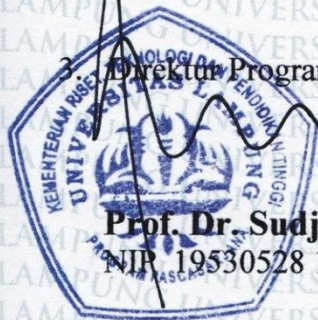
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP. 19590722 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **10 Juni 2016**

LEMBAR PERNYATAAN

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rafika Trisha Ananda

NPM : 1423012017

Tempat Tanggal Lahir: Tanjung Karang, 16 September 1983

Alamat : Jl. Imam Bonjol Gang Timbangan No.21 Kelurahan
Sukajawa-Tanjung Karang Barat

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis dengan judul “ Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung” adalah benar hasil karya penulis berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2015 s.d 14 Maret 2016. Tesis ini bukan hasil menjiplak ataupun hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, Juni 2016



Rafika Trisha Ananda

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Tanjung Karang tanggal 16 September 1983, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara buah hati Pasangan Bapak Yusuf Kemal Pasha, B.Sc dan Ibu Dra. Hernawati Muchsin.

Pendidikan formal diawali pada tahun 1988 di Taman kanak-kanak (TK) Trisula I Bandar Lampung tamat Tahun 1989, Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Teladan Rawalaut Bandar Lampung tamat Tahun 1995, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Bandar Lampung tamat Tahun 1998, dan Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Manajemen Bisnis (SMK) di SMKN 4 Bandar Lampung tamat Tahun 2001. Penulis melanjutkan pendidikan pada program studi Diploma 3 (D3) Jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung tamat Tahun 2005, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Diploma 1 (D1) Jurusan Bahasa Inggris STBA Tehnokrat Bandar Lampung tamat Tahun 2006, melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro tamat Tahun 2008. Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pasca Sarjana (S2) Jurusan Manajemen Pendidikan (MP) FKIP Universitas Lampung tamat Tahun 2016. Penulis mengawali karier Tahun 2001-2007 dengan bekerja sebagai penyiar dan reporter PT. Radio Suara Bakti (Rasubha FM). Pada tahun 2004 - 2013 penulis bekerja di TVRI Lampung sebagai penyiar berita Warta Lampung, presenter program TVRI Lampung dan program TVRI Nasional, Tahun 2008 – 2009 penulis berkesempatan bekerja sebagai reporter di TVRI Lampung. Tahun 2010 penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan jabatan Guru Bimbingan Konseling (BK) ditempatkan di SMPN 2 Sumberjaya. Tahun 2012 penulis pindah tugas menjadi (PNS) Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan ditempatkan di SMPN 12 Bandar Lampung.

MOTTO

“Keberhasilan adalah buah dari kerja keras dalam berusaha dan berdoa”

(Rafika Trisha Ananda)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

(Thomas Alva Edison)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak pernah berhenti sampai akhir nafas ini kepada Sang pemilik hati, ku persembahkan karya ku ini kepada :

1. Papa Yusuf Kemal Pasha, B.Sc (alm), mama Dra. Hernawati Muchsin dan Nenek Kampung yang telah memberikan kehangatan cinta dan kasih sayang, serta do'anya kepada Sang Pencipta dalam setiap sujudnya demi keberhasilanku, terimakasih atas semua cinta, setiap tetesan air mata, peluh dan pengorbananmu takkan terbalas hingga ku menutup mata dan usia.
2. Suamiku terkasih Ir.Ferdi Gunsan HS yang menanti keberhasilan ini
3. Anak-anakku tersayang buah hati, kalian sanjungan jiwa :
Fernanda Gunsan Putra, S.Hum, Fariz Gunsan Putra, Fathurrahman Gunsan Putra,
Ferly Gunsan Putra, Rastini, Rusli, Juliandi
4. Keluargaku tersayang Hasan Basri Siregar, S.P, Eka Tiara chandrananda, S.Sos,
Jibril Althaf Haskara Siregar, Mikail Kausar Haskara Siregar, Baby Hana
5. Bambang Ismanto
6. Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Assalamualaikum. Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang penulis susun ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Manajemen Pendidikan FKIP Unila. Dengan Judul **“Implementasi kebijakan pendidikan program bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung”**

Tesis ini dibuat dengan dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan program magister di Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum, selaku Dekan FKIP Universitas Lampung beserta staf dan jajarannya.
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah memberikan semangat dan motivasi.
5. Bapak Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si selaku dosen Pembimbing I terimakasih telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk memberanikan diri mengambil judul penelitian ini, menginspirasi, bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan perhatian, kepercayaan, motivasi dan semangat kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.

6. Bapak Dr. Alben Ambarita, M.Pd, selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk konsultasi dan memberikan bimbingan, inspirasi, arahan, dukungan, motivasi, kritik dan saran yang membangun selama penyusunan tesis sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Dr. Sumadi, M.S, selaku Dosen Pembahas yang telah bersedia memberikan dukungan, kepercayaan, meluangkan waktu untuk bimbingan dan konsultasi, motivasi, memberikan kritik dan saran yang membangun selama penyusunan tesis.
8. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan inspirasi, sumbangan pemikiran, arahan, kritik dan saran yang membangun agar tesis ini menjadi lebih baik.
9. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S, Bapak, Ibu dosen dan staf karyawan, Mas Bagio dan Mas Dwi pada program studi Magister Manajemen Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP) Universitas Lampung.
10. Ibu Dr. Sowiyah, M.Pd yang telah memberikan motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri selama penulis menyelesaikan studi di Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Lampung.
11. Keluarga Besar Hi. Muhsin (Alm), Keluarga Besar Cik Nanang (Alm), Keluarga Besar Haji Sanusi, Papi (Alm) dan Memeh(Almh).
12. Keluarga Besarku tersayang di Sumberjaya-Lampung Barat Terimakasih telah menjadi salah satu inspirasi dalam menjalani hidup.
13. Abang Edy Riswandi, Anisa Septiani, mbak Yekti Jogja, Bang Matrohupi, Bang Husein, Ancon Nainggolan, Bang Antonius, Isbedy Setiawan, Erik, Ari, Soni, Ridwan, Nato Papua, Doni Wiandika, Lulu, Yeyen, Ike, Osy, Ogie, Imam, Sandi, Wadyabala Rasubha, Mba Boni, Duwi, Mba Yurita, Pak Antonius, Listianto, Chairil, Novris, Ibu Oktilawati, Vina, Etika Sari, Ester, Yuli, Dahlia, Sumaini, Sumarni, Yurdianingsih, Eliyanti, Dumasari, Abi menggambarkan semua cerita tentang kita sederhana namun indah.
14. Bang Teguh Wibowo beserta Keluarga Besar DPD KNPI Propinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi dan kemampuan diri dalam berorganisasi.

15. Bapak Drs. H. Herbert Eka Putra, M.Si beserta Keluarga Besar Pemuda Panca Marga Propinsi Lampung, terimakasih kebersamaan, kesempatan mengembangkan potensi dan kemampuan diri di dunia organisasi.
16. Keluarga Besar TVRI Stasiun Lampung.
17. Keluarga Besar PT. Radio Suara Bakti (Rasubha FM) Lampung.
18. Teman-teman Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2014 (MP 6) terimakasih untuk kebersamaan, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain untuk menyelesaikan S2.
19. Bapak Haryanto, S.Pd, Ibu Suhatmi, MM, Bapak Irfan Sofan, S.Pd beserta Keluarga Besar SMPN 2 Sumberjaya Lampung Barat yang telah menjadi salah satu inspirasi penulis dalam mengembangkan ilmu pendidikan.
20. Bapak Drs. H. Haryanto, M.Si beserta Keluarga Besar SMPN 1 Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangan pemikiran dan kesempatan kepada penulis untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan program pendidikan bina lingkungan di sekolah ini.
21. Bapak Drs. H. Zaid Jaya, M.MPd beserta Keluarga Besar SMPN 12 Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan program bina lingkungan di sekolah ini dan memberikan dukungan, motivasi untuk menyelesaikan studi pada Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, amin

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis

Rafika Trisha Ananda

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Fokus Penelitian	16
1.3	Pertanyaan Penelitian	16
1.4	Tujuan Penelitian	17
1.5	Manfaat Penelitian	17
1.6	Definisi Istilah	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1	Pengertian Kebijakan Pendidikan	21
2.2	Fungsi dan Jenjang Kebijakan	24
2.3	Kebijakan Otonomi Pendidikan.....	26
2.4	Pendekatan dan Model Kebijakan	28
2.5	Strategi Kebijakan	31
2.6	Manajemen Peserta Didik	32
2.7	Penerimaan Peserta Didik Baru	32
2.8	Pengertian Program Bina Lingkungan	33
2.9	Tujuan Program Bina Lingkungan	35

2.10	Penelitian Relevan	36
2.11	Kerangka Pikir Penelitian	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan dan Rancangan Penelitian.....	48
3.2	Lokasi Penelitian.	51
3.3	Kehadiran Peneliti	53
3.4	Sumber Data Penelitian	55
3.5	Teknik Pengumpulan Data	56
3.6	Teknik Analisis data	59
3.7	Pengecekan Keabsahan data	66
3.8	Tahapan penelitian	66

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

4.1	Profil Kota Bandar Lampung	70
4.2	Profil SMPN 1 Bandar Lampung	82
4.3	Profil SMPN 12 Bandar Lampung	86
4.4	Paparan data Penelitian	87
4.5	Temuan penelitian	98
4.6	Pembahasan	112
4.7	Konsep Model Pengembangan kinerja guru	123

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	129
5.2	Implikasi	133
5.3	Saran	134

DAFTAR PUSTAKA	137
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	141
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Capaian APK/APM Tahun 2010-2014	12
2. Pedoman Penelitian	57
3. Pengkodean Data	63
4. Capaian APK/ APM di Kota Bandar Lampung Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2014.	75
5. Daftar Nama Kepala Sekolah SMPN 1 Bandar Lampung	82
6. Daftar nama Kepala SMPN 12 Bandar Lampung	86

DAFTAR GAMBAR

1. Alur Kerangka Pikir	47
2. Alur Rancangan	51
3. Komponen Analisis	60
4. Sistem Penerimaan Peserta Didik SMPN 1 Tahun 2014/2015.....	100
5. Sistem Penerimaan Peserta Didik SMPN 1 Tahun 2015/2016	101
6. Sistem Penerimaan Peserta Didik SMPN 12 Tahun 2015/2016.....	103
7. Strategi Penerimaan Peserta Didik SMPN 1 Tahun 2013/2014.....	104
8. Strategi Penerimaan Peserta Didik SMPN 1 Tahun 2015/2016	105
9. Strategi Penerimaan Peserta Didik SMPN 12 Bandar Lampung	106
10. Strategi Penempatan Kelas Peserta Didik SMPN 12	107
11. Faktor Pendukung Bina Lingkungan SMPN 1 Bandar Lampung	108
12. Faktor Hambatan Bina Lingkungan SMPN 1 Bandar Lampung	109
13. Faktor Pendukung Bina Lingkungan SMPN 12 Bandar Lampung.....	111
14. Faktor Hambatan Bina Lingkungan SMPN 12 Bandar Lampung.....	112
15. Model Pengembangan TT in BD	128

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara	142
2. PERDA Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012	156
3. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2013	185
4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Tahun 2014/2015	199
5. PPDB Program Bina Lingkungan SMPN 1 Bandar Lampung	105
6. Hasil Tes PPDB SMPN 1 Bandar Lampung Tahun 2014/2015	111
7. PPDB Bina Lingkungan SMPN 12 Bandar Lampung 2014/2015	115
8. Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik SMPN 1.....	120
9. Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik SMPN 12	124
10. Surat Keterangan Penelitian Di SMPN 1 Bandar Lampung	132
11. Surat Keterangan Penelitian Di SMPN 12 Bandar Lampung ..	133
12. Daftar Foto SMPN 1 Bandar Lampung	134
13. Daftar Foto SMPN 12 Bandar Lampung	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan sesungguhnya dapat dipahami dengan dua pengertian, yaitu secara luas-tidak terbatas dan secara sempit-terbatas. Dalam arti sempit atau sederhana menurut Hasbullah (2005:1) pendidikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan berlangsung dalam waktu yang terbatas, yaitu masa anak-anak dan remaja, sedangkan pendidikan secara luas adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu (Redja, 2002:3) Pengertian ini menyiratkan bahwa pendidikan telah dimulai sejak manusia berada di muka bumi, bahkan sejak dalam kandungan, umur pendidikan sama tuanya dengan kehidupan manusia.

Masalah dan tantangan pendidikan dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional, sumber lahirnya masalah dan tantangan berasal dari internal dalam Negeri Indonesia dan eksternal yang bersumber dari luar. Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, negara Indonesia ikut serta melakukan interaksi dengan dunia Internasional. Dalam konteks dunia yang mengglobal dengan adanya era globalisasi, maka menuntut

Negara Indonesia menyesuaikan segala kebijakan makro maupun kebijakan pendidikan yang bisa menjaga keutuhan dan kesinambungan pembangunan nasional tanpa kehilangan jati diri bangsa. Pendidikan merupakan sektor penting dan bisa menjadi sarana untuk peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia. Berbagai masalah dan tantangan dalam pendidikan dasar dapat diatasi oleh pemerintah dengan melahirkan berbagai kebijakan dan program yang bisa mengurangi masalah secara bertahap, seperti masalah mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, relevansi, efektivitas dan efisiensi pendidikan.

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Manusia berkualitas seperti yang diharapkan di atas, hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang komprehensif, terpadu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya, perlu ada perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan itu. Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus mengacu pada lingkungan kebutuhan peserta didik.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan segala aspek kehidupan manusia, yang menyangkut setiap individu. Hal ini dikarenakan pendidikan berperan dan berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan manusia dengan seluruh aspek kepribadiannya, dengan kata lain pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya. Pengembangan sumber daya manusia harus menjadi fokus utama dalam pembangunan bangsa (Umeh : 2008). Disinilah letak arti pentingnya pendidikan.

Menurut Rahman (2013 : 1), Tidak bisa dipungkiri bahwa masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh produk pendidikan, terutama sumber daya manusia karena manusia merupakan pelaku utama dalam proses pembangunan sekaligus tujuan akhir pembangunan. Kita bisa melihat negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Finlandia, dan Singapura ditopang oleh sistem pendidikan yang kuat dan mapan.

Kaitannya dengan urgensi pendidikan dalam pembangunan suatu bangsa, di dalam buku *Workforce 2000 : Work and Workers for the Twenty-first Century* dinyatakan : “..*Education and training are the primary system by which the human capital of a nation is preserved and increased.*..”(Johnston and Packer : 1987). Pendidikan dan pelatihan merupakan cara utama dan paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan suatu bangsa telah disadari oleh Bangsa Indonesia sejak dini. Indonesia termasuk negara yang memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia (tujuan nasional) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung makna bahwa pendidikan bukan hanya mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, melainkan juga sebagai usaha membangun peradaban bangsa di masa yang akan datang.

Keberhasilan penyelenggaraan sistem pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu peserta didik, guru, staf, sarana dan prasarana, serta lingkungan. Dari beberapa unsur tersebut, guru merupakan unsur

utama (*main element*) karena guru merupakan pelaku utama pendidikan di sekolah. Tugas utama seorang guru adalah mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dalam rangka membantu pertumbuhannya ke arah kedewasaan. Prestasi belajar peserta didik di sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas guru, meskipun faktor yang paling menentukan adalah peserta didik itu sendiri.

Guru memberikan kontribusi sebesar 30 % terhadap keberhasilan belajar peserta didik, kemudian 50% ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, 20% dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu lingkungan sekolah, kepemimpinan di sekolah, teman dan lingkungan rumah (Hattie : 2013) Hasil riset mengindikasikan jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan, peningkatan profesionalisme guru harus menjadi prioritas utama.

Sejak tahun 2005, melalui Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, guru ditetapkan sebagai tenaga profesional, dalam hal ini, sebagai pendidik profesional. Lebih lanjut ditegaskan bahwa untuk mendapat pengakuan sebagai pendidik profesional, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional (PP No.19 Tahun 2005).

Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan dengan kesempatan yang sama. Menurut Rahman (2010:1) pendidikan adalah salah satu bentuk "*human*

investment” yang dapat meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*) baik secara individu maupun keluarga, maupun sebagai bangsa.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dapat meningkatkan pendapatan seorang individu maupun keluarga, meskipun tidak bersifat mutlak, karena kualitas hidup dipengaruhi oleh banyak variabel seperti peluang pasar kerja, kondisi sosial ekonomi baik mikro maupun makro. Menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang di harapkan tidak mudah, pasti memerlukan usaha dan pengorbanan serta membutuhkan proses pendidikan. Pentingnya pendidikan juga dikemukakan Sihombing (2003:13) yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang diharapkan dari pendidikan, yaitu : 1) pendidikan diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaku utama yang dapat menciptakan kemajuan dan perkembangan, 2) pendidikan diharapkan dapat memberikan warna dan identitas bangsanya, 3) pendidikan diharapkan dapat menghasilkan naiknya tingkat kesejahteraan, meningkatkan status sosial dan nilai diri yang diperolehnya, sehingga dianggap penting untuk membuat tahapan dalam perencanaan pendidikan agar program atau kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi tepat sasaran.

Berikut ini adalah gambaran mengenai tahap-tahap perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota. Secara singkat, penjelasannya dapat penulis uraikan sebagai berikut: 1) Melakukan analisis lingkungan strategis. Lingkungan strategis adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota, misalnya : Propeda, Renstrada, Repetada, peraturan perundangan (UU, PP, Kepres, Perda, dsb), tingkat kemiskinan, lapangan kerja, harapan masyarakat terhadap pendidikan, pengalaman-pengalaman praktek yang

baik, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan lingkungan strategis harus diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan Kabupaten/Kota agar perencanaan tersebut benar-benar dapat menyatu seusia dengan perubahan lingkungan strategis.

2) Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini (dalam kenyataan) yang meliputi profil pendidikan Kabupaten/Kota (pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi), pemetaan sekolah/ guru/ siswa, kapasitas manajemen dan sumber daya pada tingkat Kabupaten/Kota dan sekolah.

3) Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang dituangkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang mencakup setidaknya pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi, dan dengan tujuan akhir terjadi peningkatan kapasitas pendidikan di kabupaten/kota.

4) Mencari kesenjangan antara butir (2) dan butir (3) sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana pendidikan keseluruhan yang akan datang (5 tahun) dan Rencana Jangka Pendek (1 tahun). Kesenjangan/tantangan yang dimaksud mencakup pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan pengembangan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah.

5) Berdasarkan hasil butir (4) disusunlah rencana kegiatan tahunan untuk 5 tahun (rencana strategis) dan rencana kegiatan rinci tahunan (rencana operasional/renop).

6) Melaksanakan rencana pengembangan pendidikan Kabupaten/Kota melalui upaya-upaya nyata yang dapat meningkatkan pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota di tiap-tiap sekolah. 7) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan.

Hasil evaluasi akan memberitahu apakah hasil pendidikan sesuai dengan yang direncanakan.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa pada hakekatnya sebuah perencanaan dibuat dalam rangka mengubah "situasi pendidikan saat ini" (dalam kenyataan) menuju ke "situasi pendidikan yang diharapkan" di masa mendatang. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang harus dipahami, yaitu kebijakan, perencanaan dan program pendidikan.

Kebijakan pendidikan dibuat mengacu pada paradigma baru pendidikan. Menurut Nurkholis (2004:135) kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para pelaksana kebijakan. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Sedangkan Muhadjir (2003 : 90) membedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substansif adalah kebijakan yang mengarah pada pokok permasalahan sedangkan kebijakan implementatif adalah penjabaran sekaligus operasionalisasi dari kebijakan substantif. Menurutnya, kebijakan yang baik harus memenuhi syarat diantaranya kebijakan yang dibuat harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang dibuat harus berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi dan memperhatikan kebijakan yang sederajat yang lain, kebijakan yang dibuat harus berorientasi ke masa depan.

Kebijakan yang dibuat harus adil dan harus berlaku untuk waktu tertentu, kebijakan yang dibuat harus merupakan perbaikan atas kebijakan yang telah ada kebijakan yang dibuat harus mudah dipahami, diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi. Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan informasi yang benar dan *up to date*, Sebelum kebijakan dijadikan keputusan formal, maka bila mungkin diujicobakan terlebih dulu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik.

Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara berkelanjutan, berkesinambungan, berlangsung secara efektif dan efisien.

Perencanaan pendidikan dibuat dengan mengacu pada kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendidikan adalah proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam rangka membuat perencanaan pendidikan tersebut, perencana melakukan proses identifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data-data internal dan eksternal (esensial dan kritis) untuk memperoleh informasi terkini dan yang bermanfaat bagi penyiapan dan pelaksanaan rencana jangka panjang dan pendek dalam rangka untuk merealisasikan atau mencapai tujuan pendidikan Kabupaten/Kota.

Perencanaan pendidikan penting untuk memberi arah dan bimbingan pada para pelaku pendidikan dalam rangka menuju perubahan atau tujuan yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi

ketidakpastian masa depan. Tanpa perencanaan pendidikan yang baik akan menyebabkan ketidakjelasan tujuan yang akan dicapai, resiko besar dan ketidakpastian dalam menyelenggarakan semua kegiatan pendidikan. Dengan kemampuan perencanaan pendidikan yang baik di daerah, oleh karenanya diharapkan akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang serius sebagai dampak dari diberlakukannya otonomi pendidikan itu di tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai dasar dalam membuat perencanaan di bidang pendidikan, umumnya orang menggunakan teknik analisis SWOT, dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan atau peluang dan tantangan atau ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Dengan teknik itu, diharapkan posisi organisasi dalam berbagai aspek bisa dipahami secara lebih obyektif, lalu bisa ditetapkan prioritas strategi dan program-programnya, serta peta urutan pelaksanaannya. Pada intinya, program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan.

Persoalan-persoalan yang mendesak dalam pendidikan nasional adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, pada dasarnya pelayanan pendidikan yang bermutu merupakan hak bagi seluruh warga Negara Indonesia. Meskipun demikian kenyataan menunjukkan bahwa saat ini belum semua warga negara dapat memperoleh haknya atas pendidikan. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib berupaya untuk memenuhinya.

Kebijakan Ditjen Mendikdasmen, menyebutkan mengenai konsep, indikator keberhasilan, dan sumber daya pendukung untuk kebijakan pemerintah. Perwujudan cita-cita pendidikan tersebut, sampai saat ini selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan salah satunya masalah biaya. Sihombing (2003:16) menegaskan bahwa dalam perkembangan pendidikan, masalah biaya menjadi masalah paling sentral untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan, karena biaya dianggap akan menghambat proses pendidikan yang nantinya akan menyangkut pada masalah sarana prasarana, proses pembelajaran, dan tenaga pendidik. Keterbatasan biaya mengakibatkan banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tingkat partisipasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan masih rendah, rendahnya partisipasi peserta didik untuk melanjutkan sekolah masih terjadi Kota Bandar Lampung.

Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999, memberikan peran nyata pada Kabupaten/Kota untuk mengatur daerahnya di berbagai bidang, termasuk diantaranya bidang pendidikan dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 81 Ayat (1) tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD untuk sektor pendidikan setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja daerah. Kewenangan ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah. Peraturan ini membahas berbagai standar pengelolaan dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan sampai pengawasan dan evaluasi yang di dalamnya terdapat program peningkatan angka partisipasi pendidikan.

Bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Bandar Lampung yang fokus pembangunannya diarahkan untuk (1) peningkatan akses pendidikan (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan (3) peningkatan manajemen pendidikan. Pencapaian kinerja dalam upaya peningkatan akses pendidikan dari pelaksanaan program dari tahun 2010-2014 terhadap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2010 – 2015 yaitu :

1) Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan

a) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan di Kota Bandar Lampung, dengan target APK SD/MI 115%, APK SMP/MTS 110%, APK SMA, SMK, MA 80% capaiannya sampai dengan tahun 2014 secara umum sudah melampaui target yaitu SD/MI 125,06%, APK SMP/MTS 106,28%, APK SMA/SMK/MA 84,22% (sumber data Profil Pendidikan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

b) Angka Partisipasi Murni yaitu proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu sesuai jenjang pendidikan pada kelompok umurnya dengan target APM SD/MI 100%, APK SMP/MTS 80%, APK SMA/SMK/MA 60 %, capaiannya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 secara umum sudah mencapai target tersebut, yaitu SD/MI 109,25%, APK SMP/MTS 87,15%, APK SMA/SMK/MA 61,44%. Perkembangan capaian APK dan APM Kota Bandar Lampung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Capaian APK dan APM Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2014

NO	URAIAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	APK SD/MI	123,17	123,17	113,98	114,44	125,08
2	APK SMP/MTs	96,78	97,81	105,01	102,15	106,28
3	APK SMA/SMK/MA	74,66	74,76	77,54	82,38	84,22
4	APM SD/MI	99,72	99,72	97,62	97,03	109,52
5	APM SMP/MTs	71,88	72,80	78,01	79,14	87,15
6	APM SMA/SMK/MA	46,22	46,27	54,53	61,32	61,44

Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung

2) Meningkatnya jumlah SMK (+2)

Perkembangan jumlah SMK di Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 2010 - 2014 dengan capaian kinerja sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan dalam rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung sebanyak 2 SMK, dengan rincian yaitu tahun 2010 sebanyak 6 SMK, tahun 2011 sebanyak 7 SMK dan tahun 2014 sebanyak 8 SMK.

Data di atas menunjukkan peningkatan angka partisipasi anak usia sekolah yang bersekolah pada tiap jenjang pendidikan, namun masih terdapat penurunan angka partisipasi pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bandar Lampung. Berkaitan dengan upaya perluasan akses pendidikan di Kota Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung merespon dengan meluncurkan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan agar peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di setiap jenjang pendidikan, agenda pembangunan di Kota Bandar Lampung upaya peningkatan akses pendidikan salah satunya melalui program pengembangan anak usia dini (PAUD), program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, program

pengembangan pendidikan menengah, program pendidikan non formal dan program pendidikan bina lingkungan.

Program pendidikan bina lingkungan adalah sebuah bentuk kebijakan bidang pendidikan dari pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka memberikan perluasan akses pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu di Kota Bandar Lampung. Program bina lingkungan yang dimulai di tahun 2012 diperuntukkan bagi peserta didik SD, SMP, dan SMA sederajat dan perguruan tinggi ini merupakan program pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertujuan membantu meretas kemiskinan dan pemerataan pendidikan bagi peserta didik miskin di Kota Bandar Lampung dengan memberikan kesempatan warga kurang mampu mengenyam pendidikan di sekolah negeri, agar kedepan peserta didik program pendidikan bina lingkungan dapat meraih masa depan yang lebih baik.

Program bina lingkungan menjadi salah satu solusi untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik yang berasal dari keluarga yang belum mampu untuk masuk ke sekolah negeri di tiap tingkatan jenjang pendidikan, hal ini dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi persoalan akses pendidikan, karena data pada APK dan APM Tahun 2010-2014, akses peserta didik sekolah dasar (SD) lebih luas dari Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat). Pada satu sisi kehadiran program bina lingkungan menjadi jembatan bagi keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, namun di sisi lain perlu disikapi beberapa kemungkinan muncul persoalan pendidikan seperti motivasi belajar menjadi rendah/tidak terlalu kuat karena tidak ada kompetisi, aspek psikologis dari peserta didik jalur bina lingkungan merasa termajinalkan ataukah merasa *super power*, pengaruh terhadap peserta didik lain

yang berasal dari jalur prestasi atau jalur umum yang masuk berdasarkan nilai karena mereka terbiasa untuk berkompetisi dalam memperoleh nilai.

Program pendidikan bina lingkungan memberikan akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik dari anak kandung pendidik dan tenaga pendidik dan keluarga yang kurang mampu agar dapat masuk di sekolah negeri di Kota Bandar Lampung dengan kuota sebesar 30 % dari jumlah peserta didik yang diterima di sekolah negeri tingkat SMP, SMA, SMK di Kota Bandar Lampung pada Tahun Ajaran 2012/2013. Tahun Ajaran 2013/2014 sebesar 40% sedangkan pada Tahun Ajaran 2014/2015 pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan jumlah kuota penerimaan sebesar 50% dan di Tahun Ajaran 2015/ 2016 dari kuota 50 % naik menjadi 70%.

Program Penerimaan Didik Baru (PPDB) di Kota Bandar Lampung tiap tahunnya melalui tiga jalur penerimaan, yaitu jalur prestasi akademik dan prestasi, jalur bina lingkungan keluarga kurang mampu, jalur bina lingkungan anak guru, melalui jalur umum bagi peserta didik baru yang masuk dan melalui penerimaan peserta didik baru dari jalur reguler (buku Bappeda Kota Bandar Lampung, halaman : 7).

Pada jalur penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan terdapat perbedaan dalam pola rekrutmen dan perbedaan jumlah penerimaan dari kuota yang telah ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagai contoh di SMPN 1 Bandar Lampung, SMPN 5 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung berada dalam satu sub rayon, berdasarkan data di SMPN 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung pada proses penerimaan peserta didik

baru Tahun Ajaran 2014/2015 melalui jalur bina lingkungan kurang dari kuota 50% yang ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga untuk memenuhi kuota 50 % SMPN 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung memperoleh tambahan jumlah peserta didik jalur bina lingkungan dari SMPN 5 Bandar Lampung, dikarenakan jumlah pendaftar calon peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan di sekolah tersebut kuota calon peserta didik baru lebih dari 50 %, sedangkan di Tahun Ajaran 2015/2016 penerimaan jalur bina lingkungan ditambah kuota penerimaannya menjadi 70 % dan sebanyak 30% melalui jalur umum dan reguler sehingga masing-masing sekolah menerapkan sistem dan strategi yang berbeda saat proses penerimaan peserta didik baru untuk diterima di sekolah masing-masing.

Disamping strategi penerimaan peserta didik terdapat perbedaan pada pola rekrutmen dan penempatan kelas, di SMPN 1 Bandar Lampung misalnya : setelah diterima calon peserta didik diberikan tes tertulis lalu diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah, kepada peserta didik bina lingkungan yang nilainya tinggi diberikan kesempatan untuk masuk di kelas unggulan bersama peserta didik dari jalur prestasi dan reguler yang memiliki nilai sesuai standar nilai yang ditetapkan sekolah, sementara di SMPN 12 Bandar Lampung, peserta didik baru dari jalur reguler dan jalur bina lingkungan diberikan tes, nilai yang tinggi dimasukkan ke kelas unggulan namun menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah peserta didik pada kelas unggulan, peserta didik jalur bina lingkungan yang lain disebar diseluruh kelas. Penambahan kuota calon peserta didik baru yang masuk ke sekolah negeri pada setiap tingkatan jenjang pendidikan

setiap tahunnya tentunya mempengaruhi proses kegiatan pembelajaran dan materi pembelajaran yang diberikan guru mata pelajaran di kelas.

Berkaitan dengan berbagai hal tersebut, menjadi salah satu alasan penulis melakukan penelitian untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan guna memberikan masukan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dan sekolah agar tujuan dari program bina lingkungan agar akses pendidikan bagi peserta didik kurang mampu dapat tercapai dan mutu sekolah dapat dipertahankan.

1.2 Fokus Penelitian

Implementasi kebijakan program pendidikan bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, studi multi situs di SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur program bina lingkungan dan penerapan regulasi program bina lingkungan di sekolah?
2. Bagaimanakah strategi sekolah untuk memenuhi kuota peserta didik untuk diterima melalui jalur program bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung?
3. Faktor pendukung dan hambatan apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan program bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan dari Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur program bina lingkungan dan penerapan regulasi program bina lingkungan di sekolah.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi sekolah dalam memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan hambatan dalam penyelenggaraan kebijakan program bina lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi pengembangan studi kebijakan publik yang berkaitan dengan proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan). Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi mengenai implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur program bina lingkungan sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam peningkatan pemerataan pendidikan, khususnya mengenai pandangan dari Walikota Bandar Lampung sebagai pembuat kebijakan pendidikan program bina

lingkungan, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/*stakeholders* penting, sehingga informasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan implementasi kebijakan program bina lingkungan saat ini, dan masa datang.

2. Bagi Dinas Pendidikan sebagai lembaga pemerintah, penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi pembangunan khususnya dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung, serta memberi ide dan gagasan dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan sebagai langkah evaluasi dalam mengukur tingkat keberhasilan dan mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam program kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Bagi penulis, penelitian ini sebagai informasi yang baru, yang berguna untuk memberikan pemahaman bagi penulis tentang maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan dari program bina lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.6 Definisi Istilah

- 1.6.1 Kebijakan merupakan cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka, dalam hal ini kegiatan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

- 1.6.2 Kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan tercapai.
- 1.6.3 Program pendidikan bina lingkungan merupakan program pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang pendidikan yang ditujukan bagi calon peserta didik baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi yang berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga Kota Bandar Lampung dengan memberikan porsi 50 persen masuk calon peserta didik untuk mendaftar ke sekolah negeri tanpa seleksi dan gratis yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi calon peserta didik dari keluarga secara ekonomi kurang mampu. Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan program pendidikan bina lingkungan kepada sekolah-sekolah negeri, guna memberikan kesempatan belajar di sekolah-sekolah negeri tanpa tes bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lingkungan sekolah negeri setempat.
- 1.6.4 Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, dapat pula diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sumber

daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

- 1.6.5 Peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.
- 1.6.6 Akses/pemerataan pendidikan, secara konseptual konsep pemerataan yakni : pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada peserta didik agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi peserta didik harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.
- 1.6.6 Strategi adalah pola dalam suatu arus keputusan yang sedang berlangsung, yang diarahkan pada penyesuaian dan pengaitan sumber daya organisasi dengan peluang dan kendala lingkungan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang teori kebijakan pendidikan yang meliputi tahap formulasi hingga monitoring kebijakan, digunakan pula beberapa teori pendukung lainnya seperti desentralisasi kebijakan pendidikan dan penulis menyajikan kerangka pikir.

2.1 Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan seringkali disamakan dengan istilah dalam dunia politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan dan rencana strategis. Beberapa pakar telah menegaskan pengertian kebijakan pendidikan, kedua kata dari kebijakan dan pendidikan mempunyai arti yang luas dan beragam, sehingga perlu diketahui dahulu apa yang dimaksud dari kedua istilah tersebut.

Abidin (2006:17) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn, 1999). Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan hukum (*Law*) dan peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif,

meskipun kebijakan juga mengatur “ apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh ”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Dunn (2000:132) menyimpulkan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan pilihan kolektif yang saling tergantung termasuk keputusan. Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan. Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Abidin menyimpulkan (2006:22) bahwa kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu : pemerintah, masyarakat dan umum. Sehingga dapat peneliti simpulkan pemaknaan ini mencakup subjek, objek dan lingkungan dari kebijakan, oleh karena itu kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan peraturan yang membimbing suatu organisasi, dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah hasil pengambilan

keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan personil dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat, artinya keputusan strategis yang ditetapkan sebelumnya untuk menjadi patokan pelaksanaan manajemen kehidupan masyarakat luas.

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi, sedangkan kebijakan pendidikan merupakan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan pada masyarakat dalam kurun waktu tertentu (Nugroho R, 2004 : 1-7). Berdasarkan pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan

dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Pakar kebijakan publik Thomas Dye (1992:2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Dari definisi tersebut peneliti simpulkan bahwa untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

2.2 Fungsi dan Jenjang Kebijakan

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, *input* (masukan), proses (transformasi), *output* (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan masalah ini, kebijakan dipandang sebagai : (1) pedoman untuk bertindak (2) pembatas perilaku dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan Pongtuluran (1995:7). Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

Menurut Pongtuluran (1995 : 8) Kebijakan adalah produk pengambilan keputusan strategis maka jenjang kebijakan dihubungkan dengan jenjang manajemen, yaitu :

1) Manajemen puncak. Kebijakan yang disusun oleh jenjang ini berasal dari hampir semua sumber. Kebijakan ini mempunyai kepentingan yang tinggi dan kekhususan yang rendah. Kebijakan ini cenderung bersifat umum dan utamanya memiliki wawasan untuk eksternal yang berhubungan dengan keuangan, hubungan masyarakat dan penelitian.

2) Manajemen menengah. Kebijakan ini cenderung mengikuti perintah atau referensi dari manajemen puncak atau manajemen menengah, sumbernya dapat berasal dari sejarah, budaya atau pendahulunya.

3) Manajemen Operasi. Kebijakan yang ditetapkan pada jenjang ini biasanya berlaku untuk kegiatan operasi dan bidang fungsi semua organisasi. Kebijakan operasi berasal dari jenjang bawah, sebab itu kurang tegas dan penting, tetapi lebih khusus dari kebijakan yang lebih tinggi.

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004 : 31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak, keberadaan kebijakan penting dalam suatu organisasi apapun karena dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai aktivitas strategi untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi.

2.3 Kebijakan Otonomi Pendidikan

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti hukum atau aturan (Abdurrahman, 1987 : 9). Dalam konteks etimologis ini, beberapa penulis memberikan pengertian tentang otonomi. Otonomi diartikan sebagai *zelfwetgeving* “perundangan sendiri” (Koesoemahatmadja, 1979 : 9), “mengatur atau memerintah sendiri” (Riant Nugroho, 2000 : 46). Koesoemahatmadja (1979), lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain

mengandung arti “perundangan”, juga mengandung pengertian “pemerintahan” (*bestuur*).

Secara konseptual banyak konsep tentang otonomi yang diberikan oleh para pakar dan penulis, Wayong (1979 : 16) mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Kebijakan otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah sebagai berikut, diantaranya:

a) Secara general otonomi pendidikan menuju pada upaya meningkatkan mutu pendidikan sebagai jawaban atas “ kekeliruan ” kita selama lebih dari 20 tahun bergelut dengan persoalan-persoalan kuantitas. b) Pada sisi otonomi daerah, otonomi pendidikan mengarah pada menipisnya kewenangan pemerintah pusat dan membengkaknya kewenangan daerah otonom, atas bidang pemerintahan berlabel pendidikan yang harus disertai dengan tumbuhnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. c) Terdapat potensi tarik menarik antara otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah dalam menempatkan kepentingan ekonomik dan finansial sebagai kekuatan tarik menarik antara pemerintahan daerah otonom dan institusi pendidikan. d) Kejelasan tempat bagi institusi-institusi pendidikan perlu diformulasikan agar otonomi pendidikan dapat berjalan pada relnya. e) Pada tingkat persekolahan, otonomi pendidikan berjalan atas dasar desentralisasi dan prinsip *School Based Management* pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, penataan kelembagaan pada level dan tempat yang menjadi faktor kunci keberhasilan otonomi pendidikan. f) Sudah selayaknya jika otonomi pendidikan harus bergandengan dengan kebijakan akuntabiliti terutama yang

berkaitan dengan mekanisme pendanaan atau pembiayaan pendidikan. g) Pada level pendidikan tinggi, kebijakan otonomi masih tetap berada dalam kerangka otonomi keilmuan. h) Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan otonomi pendidikan tinggi dapat ditempatkan bukan pada kepentingan daerah semata-mata melainkan pada kenyataan bahwa pendidikan tinggi adalah aset nasional. i) Secara makro, apapun yang terkandung di dalamnya, otonomi pendidikan tinggi haruslah menonjolkan keunggulan-keunggulannya. (Yoyon, 2000:6)

Dari beberapa konsep dan batasan di atas, otonomi daerah jelas menunjuk pada kemandirian daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa atau mengupayakan seminimal mungkin adanya campur tangan atau intervensi pihak lain atau pemerintah pusat dan pemerintah di atasnya. Dengan adanya otonomi tersebut, daerah bebas untuk berimprovisasi, mengekspresikan dan mengapresiasi kemampuan dan potensi yang dimiliki, mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa berkarya sesuai dengan kebebasan yang dimilikinya.

2.4 Pendekatan dan Model Kebijakan

Dunn (2000 : 135) menjelaskan ada sejumlah model analisis kebijakan model kebijakan yang bisa dijadikan rujukan , (1) Model deskriptif, (2) Model normatif, (3) Model Verbal, (4) Model simbolis, sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan bermanfaat untuk menyederhanakan sistem masalah dengan mampu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para ahli kebijakan. Manfaat lain adalah untuk membantu

membedakan hal yang esensial, mempertegas hubungan anatar faktor dan variabel penting, dan mampu menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan kebijakan.

Penjelasan dari 4 (empat) bentuk utama model kebijakan diatas: 1) Model Deskriptif, bertujuan menjelaskan, mendeskripsikan dan atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan, biasanya digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan. 2) Model Normatif, bertujuan menjelaskan dan atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Diantara beberapa jenis model normatif yang digunakan oleh para analis kebijakan adalah model normatif yang membantu tingkat kapasitas pelayanan yang optimum. Masalah-masalah keputusan normatif biasanya dalam bentuk nilai-nilai variabel yang terkontrol (kebijakan) yang akan menghasilkan manfaat yang terbesar (nilai) sebagai terukur dalam variabel keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan. 3) Model Verbal, model normatif dan deskriptif dapat diekspresikan di dalam tiga model utama, verbal, simbol dan prosedural.

Model verbal dapat diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa sehari-hari, bukannya bahasa logika simbolis dan matematika, dan mirip dengan masalah substantif. Dalam menggunakan model verbal, analis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukannya dalam bentuk nilai-nilai angka pasti. Model verbal relatif mudah dikomunikasikan diantara para ahli dan orang awam dan biayanya murah.

Keterbatasan model verbal adalah bahwa masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit, atau tersembunyi sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan. 4) Model simbolis. Model ini menggunakan simbol matematis untuk menerangkan hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya memiliki sifat (*characterize*) suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam model matematika, statistikan dan logika. Model simbolis sulit untuk dikomunikasikan diantara orang awam, termasuk para pembuat kebijakan dan bahkan diantara para ahli pembuat model kebijakan sering terjadi kesalah-pahaman tentang elemen dasar dari model. Kelemahan model simbolis ini adalah hasilnya mungkin tidak mudah diinterpretasikan, bahkan diantara para spesialis, karena asumsinya tidak dinyatakan secara memadai.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti berkesimpulan akan menggunakan model deskriptif, normatif dan verbal, dikarenakan dapat membantu peneliti mendeskripsikan, membantu menentukan peneliti mencari nilai-nilai variabel kebijakan yang terkontrol sehingga akan menghasilkan manfaat yang terbesar dari nilai sebagai variabel keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan dan dengan menggunakan model verbal melalui nalar dan dieksresikan dalam bahasa sehari-hari untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan model kebijakan yang dibuat para pembuat kebijakan.

2.5 Strategi Kebijakan

Sebelum membahas strategi sekolah dalam implementasi kebijakan program pendidikan bina lingkungan, pada bagian ini peneliti menjelaskan lebih dahulu tentang pengertian strategi yang merupakan konsep dasar dari pengertian tersebut. Menurut Salusu (2003 : 85) Strategis berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *strategeus*. *Srategos* berarti jendral, namun dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas, Rabin (2000 : 15) mendefinisikan strategi sebagai kerangka kerja (*frame work*), teknik dan rencana yang bersifat spesifik atau khusus, selain itu secara lebih bebas perkataan “strategi sebagai teknik dan taktik” menurut Akdon (2007 : 3) dapat diartikan sebagai “kiat” seorang komandan untuk memenangkan pertempuran yang menjadi tujuan utama dalam peperangan.

Pengertian strategi diatas menunjukkan ada hal yang menarik, yaitu adanya penyesuaian keputusan strategi dengan lingkungan, baik yang berupa ancaman maupun peluang. Hal tersebut menggambarkan bahwa strategi adalah proses yang dinamis, berarti strategi merupakan tindakan untuk menghadapi kondisi lingkungan yang berubah dan berbeda serta merupakan cara untuk menciptakan peluang dan menghadapi ancaman. Penerapan strategi dalam organisasi pendidikan sesungguhnya merupakan paradigma baru dalam perencanaan pendidikan.

Berkaitan dengan penjelasan-penjelasan tentang pengertian tentang strategi yang telah diuraikan, maka secara operasional strategi bisa berarti suatu tindakan untuk menggunakan potensi sumber daya organisasi secara maksimal untuk mencapai

tujuan demi memanfaatkan dan menyesuaikan dengan lingkungan baik berupa peluang maupun ancaman serta tindakan-tindakan itu mampu berpengaruh terhadap sikap masyarakat agar berperilaku seperti yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi dengan kata lain strategi adalah rencana yang disatukan sehingga mengikat semua bagian dalam organisasi. Strategi bersifat menyeluruh meliputi semua aspek kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan secara terpadu dalam arti ada sinergi antara satu dan yang lain.

2.6 Manajemen Peserta didik

Menurut Nasihin dan Sururi dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2009:205) peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya, sedangkan manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik masuk sekolah sampai dengan mereka lulus dari lembaga pendidikan (sekolah) tersebut, sehingga dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa manajemen peserta didik merupakan upaya sekolah untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai pada saat peserta didik lulus dari lembaga pendidikan (sekolah).

2.7 Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta didik menurut Hendayat Soetopo dan Wasty Soemanto (1982) adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan

keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan/pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.

2.8 Pengertian program Bina Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan siswa peserta didik baru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung, pada BAB V tentang jalur dan sistem seleksi Penerima Peserta Didik baru pasal 10 butir ke (3) jalur bina lingkungan, diperuntukkan bagi :

1. Calon peserta didik baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi yang berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga Kota Bandar Lampung dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus PPDB yang telah ditetapkan.
 - b. Memiliki dan menyerahkan fotocopy kartu jamkesmas atau jamkesda yang sah.
 - c. Ada surat keterangan tidak mampu dari lurah atau dari kepala Sekolah Dasar.
 - d. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga dan KTP orang tuanya.
 - e. Menyerahkan kartu keluarga yang asli, dan akan dikembalikan pada saat pengumuman.

- f. Hanya diperkenankan memilih satu sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
2. Anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Menyerahkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga atau KP4
 - b. Menyerahkan fotocopy surat tugas dari satuan pendidikan tempat bertugas.
 - c. Memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandar Lampung dan program bina lingkungan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan pada bagian keempat mengenai hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada pasal 32 Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat, Pasal 33 Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan serta pemeliharaannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. Membantu menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. Menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;
- d. Menyediakan anggaran pendidikan;
- e. Menyelenggarakan wajib belajar.

Pada BAB XII peserta didik bagian satu hak dan kewajiban pasal 34 ayat (1)

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak :

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan dengan memperhatikan bakat, minat dan kemampuannya.
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi.
- d. Mendapatkan jaminan pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berstatus sebagai penduduk daerah.

Dalam ayat (7) syarat dan mekanisme memperoleh beasiswa dan jaminan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf c dan d serta syarat dan mekanisme penerimaan peserta didik baru di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota. Pada bagian kedua tentang Penerimaan dan Daftar Ulang pasal 35 ayat (4) daya tampung Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, 70 % peserta didik masuk melalui jalur reguler, dan 30 % peserta didik masuk melalui jalur bina lingkungan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

2.9 Tujuan Program Bina lingkungan

Program bina lingkungan diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari anak guru dan keluarga kurang mampu di Kota Bandar Lampung. Peserta didik bina

lingkungan yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya pada tiap satuan pendidikan diharapkan mendaftar pada sekolah lanjutan yang berdekatan dengan jarak tempat tinggal ke sekolah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 tahun 2013 pasal 12 paragraf 2 pasal 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tanggal 11 Juni 2013 (1) seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB dapat menggunakan SKHUN SD/MI/SDLB atau nilai akhir pada program paket A, dan dapat juga dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang di akui sekolah, serta memberikan prioritas sampai dengan 50 (lima puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. (2) apabila kriteria pada ayat 1 di atas tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes skolastik atau tes potensi akademik.

2.10 Penelitian Yang Relevan

2.10.1 Hasil penelitian dari Gita Susanti dan Indah Anugrah Supardi (2014), tesisnya yang berjudul Studi Implementasi Program Pendidikan gratis di tanah Toraja, *Studies Implementation of Free Education Program In Tana Toraja*. Penelitian ini melihat implementasi dari faktor konten/isi dan konteks kebijakan. Dimana konten/isi kebijakan terdiri atas kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang dilibatkan sedangkan dari konteks kebijakan terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap. Setelah

diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa program pendidikan gratis ini berjalan dengan baik walau masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif.

2.10.2 Hasil penelitian Sitta Aulia (2012), tesis yang berjudul Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). mengungkapkan dampaknya dalam pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun di Kota Surabaya. Pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan yang nyata dan luas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan kebijakan pendidikan di wilayahnya.

Penelitian ini dilakukan di lima sekolah menengah dan kejuruan yang ada di Surabaya, dengan sumber data dinas pendidikan kota Surabaya, pengamat pendidikan, kepala sekolah dan guru di sekolah menengah dan kejuruan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Dukungan pemerintah pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dengan pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) mulai pendidikan dasar hingga pendidikan menengah negeri dan Hibah BOPDA pada sekolah swasta; 2) Pelaksanaan program BOPDA berdampak positif pada peningkatan akses pendidikan untuk masyarakat kota Surabaya dan berdampak adanya kuota bagi masyarakat luar kota Surabaya;

3) Dampak BOPDA pada pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah menengah dan kejuruan berpengaruh pada manajemen pelaksanaan ditingkat sekolah, antara lain: kebijakan sekolah dalam hal pembiayaan, kondisi sarana dan prasarana pembelajaran, partisipasi peserta didik dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta partisipasi orangtua.

2.10.3 Hasil penelitian Eko Setiyawan, Choirul Saleh, Ainul Hayat, (201, tesis yang berjudul Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). Pendidikan menjadi salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang layak dan bermutu, Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Surakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada: (1) Penetapan penerima BPMKS sudah berjalan sesuai dengan peraturan. (2) Pengalokasian dana BPMKS sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. (3) Laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan. (4) Monitoring terhadap penggunaan dana BPMKS sudah dilakukan dengan baik. (5) Hasil implementasi BPMKS sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemui permasalahan. Namun ditemui beberapa kendala yaitu komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan BPMKS, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, pencairan dana terlambat, dan

belum ada unit yang secara khusus menangani BPMKS. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.

2.10.4 Desertasi Baedhowi berjudul Implementasi kebijakan otonomidaerah bidang pendidikan : studi kasus di kabupaten Kendal dan kota Surakarta.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini diharapkan masyarakat mendapatkan layanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan. Salah satu bidang pemerintahan yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan.

Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah baik bersifat koliseptual maupun masalah faktual. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka dikhawatirkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan akan membawa dampak negatif yang lebih kompleks seperti masalah disintearasi bangsa. Itulah sebabnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dukungan yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan otonorni daerah bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu sistem pendidikan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam tentang "implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten/Kota". Cakupan penelitian ini meliputi faktor *Translation ability* para pelaku kebijakan, termasuk kapasitas sumberdaya manusia dan pemahamannya terhadap kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, manajemen dan organisasi, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, diadopsi dari Teori Gerston (2002).

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji prospek implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif/naturalistik karena peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah, menggunakan metode kualitatif maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya, melalui metode kualitatif dapat pula ditemukan informasi yang bersifat perasaan, norma, nilai, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut dari seseorang maupun kelompok orang.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, pertama dilihat dari perspektif *policy initiation*, proses pengambilan keputusan tidak ditentukan secara obyektif oleh analisis kebutuhan (*need analysis*) dalam pemecahan masalah publik tetapi lebih ditentukan oleh itemst para aktor penentu kebijakan daerah yang jangkauannya lebih berjangka pendek. Proses pengambilan keputusan yang berlaku sampai saat ini cenderung berakibat pada kurang relevannya kebijakan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik, aktor utama Bupati/Walikota dan Komisi E DPRD, jauh lebih dominan dan saling mempengaruhi dalam penetapan kebijakan, dibanding aktor pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan. Dalam penetapan dan implementasi kebijakan, publik belum dilibatkan dan diberdayakan, serta belum dimobilisasi secara signifikan. Kedua, kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten/Kota dipandang dari konsep "*translation ability*" belum cukup efektif dalam pengelolaan pelayanan pendidikan di daerah masing-masing. Para pegawai Dinas Pendidikan memiliki

rata-rata latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan latar belakang pekerjaan yang cukup relevan namun posisi tawar (*bargaining position*) dari Dinas Pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan aktor lainnya, yaitu Bupati/Walikota dan DPRD. Sebaliknya, aktor utama (Bupati/Walikota dan DPRD) yang memiliki posisi tawar lebih tinggi cenderung memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan latar belakang pekerjaan yang kurang relevan. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang tidak seimbang mengakibatkan adanya *imbalance structure* dalam proses interaksi antar-aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam penentuan maupun dalam implementasi kebijakan cenderung kurang berkualitas, yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna kebijakan di bidang pendidikan.

Ketiga, organisasi dan manajemen sebagai *support system* belum dapat memberikan fasilitas terhadap berjalannya implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Aparatur Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan cenderung lebih berfungsi sebagai sub-ordinasi dari aktor-aktor penentu kebijakan daripada sebagai mitra sejajar yang tugasnya melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan pendidikan agar semakin berkualitas. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara kebijakan publik, aparatur pendidikan cenderung kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*demand driven*) tetapi lebih berorientasi secara politis pada kepentingan kepala pemerintahan. Perbedaan nomenklatur nama dinas dan struktur organisasi menimbulkan kesulitan dalam koordinasi antar Kabupaten/Kota, dengan pemerintah propinsi, serta pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas institusi.

Keempat, penyediaan anggaran untuk implementasi kebijakan pendidikan dan jenis-jenis programnya bervariasi antara kedua daerah otonom tersebut. Pemerintah Kendal mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar dibanding anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Surakarta. Jika dilihat pemanfaatannya, masih cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program-program fisik.

Kelima, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi implementasi kebijakan pendidikan baik di Kabupaten Kendal maupun Kota Surakarta secara minimal terpenuhi tetapi tidak didukung dengan biaya perawatan yang memadai. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan yang konsisten dan menarik di kedua daerah tersebut, bahwa pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru lebih murah daripada pengajuan anggaran untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang sudah ada.

Keenam, Indonesia sebagai negara yang memiliki cakupan wilayah yang luas, menerapkan kebijakan otonomi daerah. Salah satu pertimbangan mendasar adalah bahwa tidak mungkin pemerintah mengurus pemerintahan sendiri tanpa membagi kewenangan, dan sekaligus tanggung jawab dengan pemerintah daerah, juga dengan masyarakat sebagai pengguna kebijakan.

Hasil penelitian juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Bagi pemerintah : pertama untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah, kedua, untuk mengurangi "beban" pemerintah Kabupaten/Kota dalam

mengimplementasikan otonomi daerah bidang pendidikan, perlu dilakukan peninjauan kembali kewenangan dan tanggung jawab bidang pendidikan yang diberikan kepada Kabupaten/ Kota, sesuai dengan *translationability* dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu kewenangan Kabupaten/Kota yang perlu dipertimbangkan kembali adalah kewenangan yang terkait dengan rekrutmen guru.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota, agar implementasi kebijakan otonomi daerah lebih efektif, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kedua, agar implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan bidang pendidikan, dalam pengangkatan atau pengisian jabatan masing-masing aktor kebijakan di daerah, ketiga, untuk mempercepat implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan pemerintah daerah perlu memiliki program-program aksi, antara lain: peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan *translation ability*, penataan struktur organisasi dan manajemen, dan peningkatan anggaran pendidikan.

Bagi peneliti : peneliti perlu melakukan kajian dan uji coba lebih lanjut dengan menggunakan alternatif pendekatan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diusulkan untuk memperhatikan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi otonomi daerah bidang pendidikan di Kabupaten/Kota, yaitu: (1) politik, (2) *translation ability*, (3) komitmen, (4) kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia, (5) organisasi dan manajemen, (6) dana penunjang, (7) sarana dan

prasarana, (8) Budaya dan karakteristik masyarakat, dan (9) kepastian hukum dan undang-undang yang menjadi dasar implementasi.

2.11 Kerangka Pikir Penelitian

Alur kerangka pikir peneliti pada gambar dibawah ini adalah sebagai berikut : program pendidikan bina lingkungan adalah salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dan diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari anak pendidik dan kependidikan serta keluarga kurang mampu di Kota Bandar Lampung.

Pada jalur penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan di beberapa sekolah terdapat perbedaan dalam pola rekrutmen dan perbedaan jumlah penerimaan dari kuota yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dimana jumlah kuota yang bertambah setiap tahunnya seperti pada tahun ajaran 2012/2013 sebesar 30% , tahun ajaran 2013/2014 ditingkatkan kuotanya menjadi 40%, tahun ajaran 2014/2015 menjadi 50% dan ditahun 2015/2016 sebesar 70%, sebagai contoh di SMPN 1, SMPN 5 dan SMPN 12 Bandar Lampung berada dalam satu sub rayon, berdasarkan data di SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung, pada proses penerimaan peserta didik baru peserta didik yang mendaftar melalui jalur bina lingkungan kurang dari kuota 50% sehingga untuk memenuhi kuota 50 % SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung memperoleh tambahan jumlah peserta didik bina lingkungan dari SMPN 5 Bandar Lampung, pelimpahan ini dikarenakan jumlah pendaftar calon peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan di SMPN 5 Bandar Lampung lebih dari kuota 50 %, karena seluruh peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur bina lingkungan

seluruhnya diterima, untuk menentukan apakah peserta didik tersebut dapat masuk ke kelas unggulan atau membaur di kelas reguler sekolah memberikan tes potensi akademik, disamping itu strategi masing-masing sekolah adalah penempatan kelas di SMPN 1 didasarkan pada kemampuan peserta didik sementara di SMPN 12 Bandar Lampung didasarkan pada kebutuhan kelas.

Tahun ajaran 2015/2016 Pemerintah Kota Bandar Lampung menambah jumlah kuota penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan sebanyak 70 %, tidak meratanya jumlah peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan dan penambahan jumlah kuota penerimaan jalur bina lingkungan secara tidak langsung berpengaruh pada jumlah kuota penerimaan peserta didik baru pada setiap jenjang pendidikan pada sekolah negeri, karena peserta didik yang diterima pada jalur reguler menjadi berkurang menjadi 30 %, hal ini tentu mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah, dikarenakan peserta didik yang masuk melalui jalur umum dan prestasi terbiasa untuk berkompetisi, memiliki keunggulan nilai dan prestasi peserta didik secara individu karena mereka masuk berdasarkan standar nilai dan prestasi yang mereka miliki dan biaya pendidikan di Kota bandar Lampung.

Di satu sisi Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya memperluas akses pendidikan, namun di sisi lain akan melahirkan produk akademik pada tiap satuan jenjang pendidikan, karena sekolah memiliki tujuan mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan prestasi peserta didik serta mempertahankan mutu serta kualitas pendidikan. Melalui program bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung ini diharapkan peserta didik yang berasal dari keluarga belum mampu di Kota Bandar Lampung diberikan kesempatan untuk dapat terus bersekolah dan

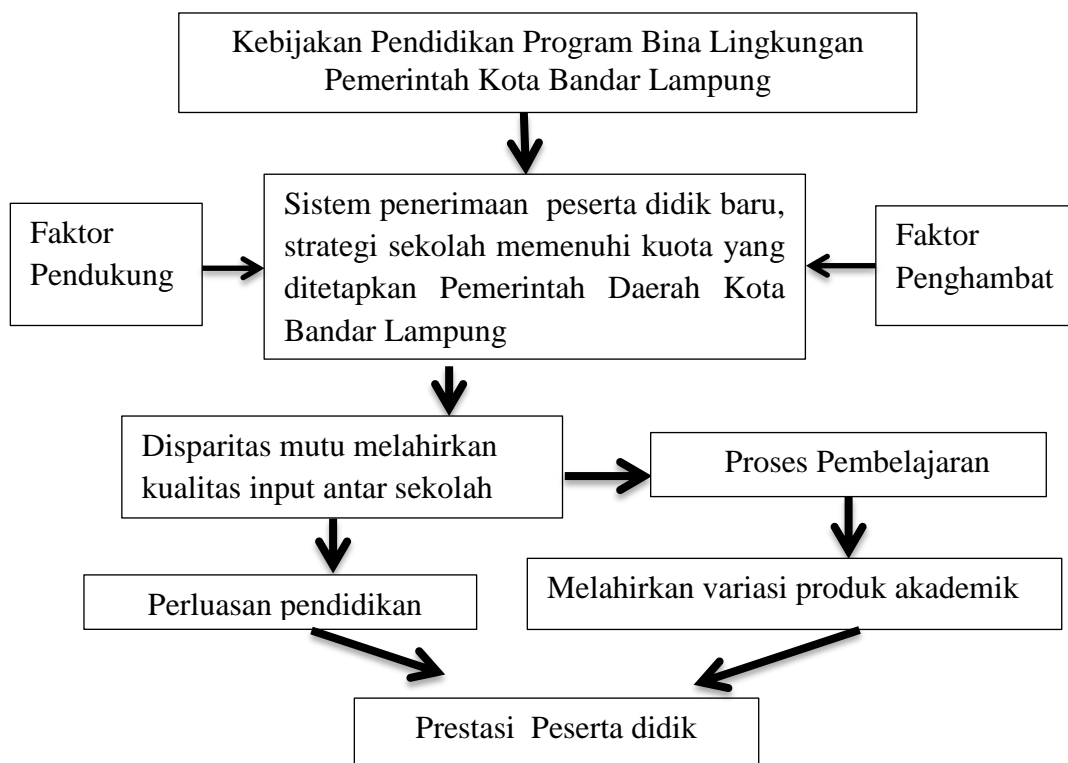
melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya, dan tidak putus sekolah sehingga dapat meraih masa depan yang lebih baik dan mengurangi jumlah peserta didik putus sekolah.

Program bina lingkungan memberdayakan lembaga pendidikan sekolah negeri di Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat dan lembaga pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebagai pendidik secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya pro aktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Alben (2006) menjelaskan manajemen peserta didik terdapat empat prinsip dasar, yaitu : (a) peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka, (b) kondisi peserta didik sangat beragam ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya sehingga peserta didik memiliki wahana berkembang secara optimal, (c) peserta didik hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan, (d) pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor.

Program bina lingkungan mendukung komitmen Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pembangunan pendidikan di Kota Bandar Lampung, namun penting untuk digaris bawahi bahwa selain akses pendidikan yang juga tidak kalah penting adalah proses penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan, dukungan sarana prasarana dan biaya operasional juga ditingkatkan, sehingga selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan di setiap jenjang pendidikan, juga memberikan ruang bagi sekolah untuk mencari cara agar perluasan pendidikan dapat juga diimbangi dengan mempertahankan mutu sekolah karena ada dua jalur penerimaan selain jalur bina lingkungan yaitu jalur prestasi, umum atau reguler.

Alur kerangka pikir penulis gambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas berurutan mengenai pendekatan dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, tahapan penelitian dan pengecekan keabsahan data.

3.1 Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini membahas dan mengkaji kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyenggarakan program pendidikan bina lingkungan untuk pemerataan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandar Lampung di SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya mengenai sesuatu, keadaan atau fenomena sosial tertentu guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan agar dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan program pemerintah Kota Bandar Lampung tentang program pendidikan bina lingkungan dan dampaknya terhadap mutu serta faktor penghambat atau kendala pemerataan pendidikan terutama bagi peserta didik kurang mampu di Kota Bandar Lampung. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk tulisan tentang

orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang nampak atau kelihatan. Menurut Sugiyono (2010:15) metode kualitatif sering disebut naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*). Pendekatan kualitatif memandang realita sosial sebagai sesuatu yang utuh/holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan yang bersifat interaktif. Penelitian ini memerlukan pengamatan mendalam dan menyeluruh, data yang diungkap bukan berupa angka-angka melainkan berupa kata-kata dan dokumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengungkap fenomena yang ada dan peneliti berupaya menemukan peristiwa-peristiwa yang dapat dipahami peneliti, berbagai isu yang ada, dan fenomena-fenomena yang nampak pada obyek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori fenomenologi.

Maleong (2004:9) menyatakan dalam pandangan fenomenologi peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan kualitatif digunakan dengan berbagai pertimbangan, seperti yang disimpulkan oleh Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2009:5) yaitu: (1) menyesuaikan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan realita atau kenyataan, (2) pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, (3) pendekatan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola atau nilai dan data yang ada di lapangan.

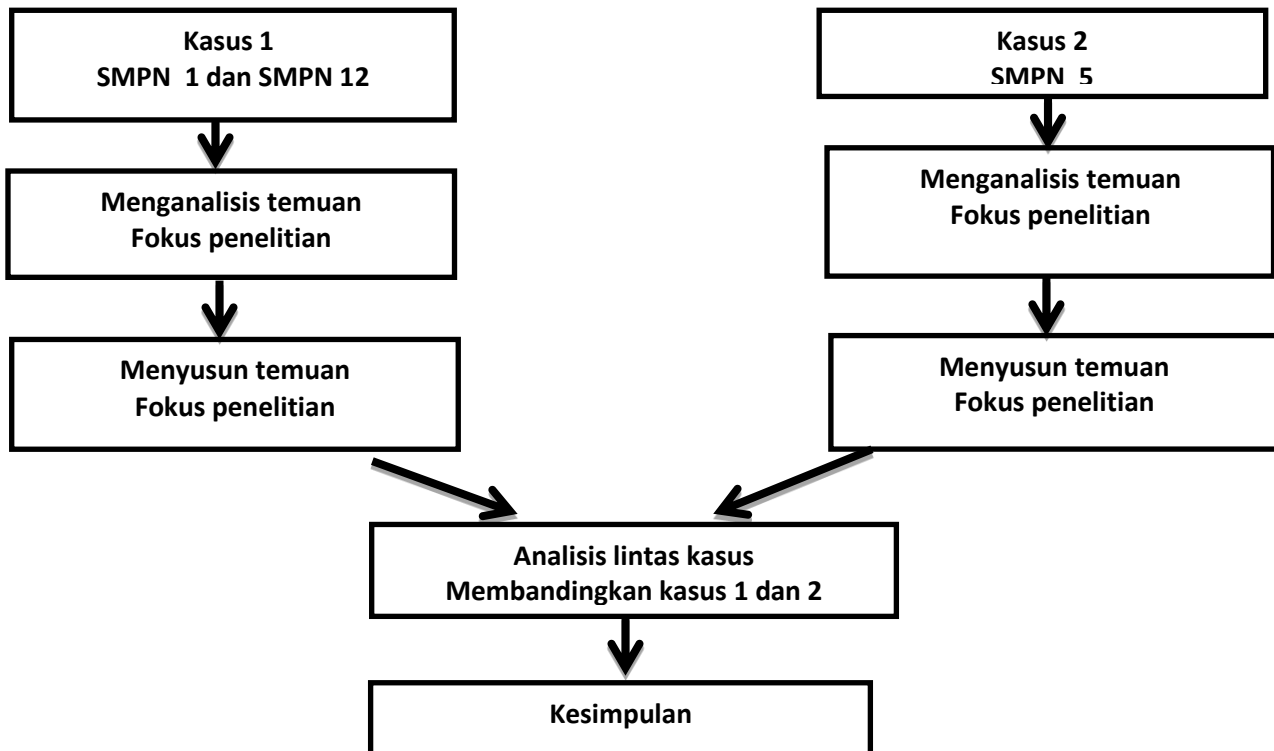
Peneliti langsung ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan

program bina lingkungan terutama pada penerimaan peserta didik baru program ini. Data yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa : kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi dan peristiwa yang diobservasi. Pengumpulan data dan informasi ini peneliti sekaligus sebagai instrumen yang dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), oleh karena itu peneliti mencatat, menggunakan alat perekam dan mengamati perilaku yang diwawancarai.

Penelitian ini menggunakan metode multi situs, karena penelitian ini berusaha membandingkan beberapa subjek dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari kedua latar belakang sekolah yang diteliti. Proses penelitian yang digunakan Yin (2009 : 57) yaitu : 1) Mendefinisikan dan merancang penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan kajian pengembangan teori atau konsep untuk menentukan kasus atau kasus–kasus dan merancang protokol pengumpulan data.

2) Menyiapkan, mengumpulkan dan menganalisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan persiapan, pengumpulan dan analisis data berdasarkan protokol penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Pada penelitian studi kasus jamak, penelitian pada setiap kasus dilakukan sendiri-sendiri hingga menghasilkan laporan sendiri-sendiri juga.

3) Menganalisis dan menyimpulkan. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian studi kasus. Pada penelitian studi kasus jamak, analisis, dan penyimpulan dilakukan dengan mengkaji saling silangkan hasil-hasil penelitian dari setiap kasus dan penyimpulan digunakan untuk memperbaiki konsep atau teori yang telah dibangun pada awal tahapan penelitian.



Gambar 3.1 Alur Rancangan Penelitian

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung, karena program pendidikan bina lingkungan ini merupakan kebijakan pendidikan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Adapun tempat penelitian yang akan dilaksanakan adalah di SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih kedua sekolah tersebut karena peneliti ingin mengetahui proses penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan anak guru dan keluarga kurang mampu di SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung. Kedua sekolah ini berada dalam satu sub rayon dan sama-sama menerima limpahan peserta didik jalur bina lingkungan keluarga kurang mampu dari SMPN 5 Bandar Lampung, selain itu peneliti adalah guru bimbingan konseling di SMPN 12 Bandar Lampung sehingga penelitian diharapkan mudah, cepat, tepat waktu sesuai jadwal dan target yang diharapkan.

SMPN 1 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah unggulan di Kota Bandar Lampung yang pernah dijadikan sebagai salah satu Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), dalam penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan yang digulirkan pemerintah Kota Bandar Lampung, sekolah ini baru tahun ajaran 2013/2014 melaksanakan program pendidikan bina lingkungan karena sebelumnya menjalankan program penerimaan sistem RSBI. SMPN 1 Bandar Lampung memiliki pola penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan dengan tetap memberikan tes potensi akademik, yang terdiri dari Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Seluruh peserta didik pada jalur ini diterima namun tetap memiliki standar nilai agar peserta didik bina lingkungan yang memiliki nilai yang baik diberikan kesempatan untuk masuk di kelas unggulan bersama peserta didik dari jalur penerimaan prestasi dan reguler yang memiliki standar nilai yang ditetapkan sekolah, pada tahun ajaran 2015/2016 sekolah memiliki strategi pada proses penerimaan peserta didik jalur bina lingkungan yaitu tidak lagi menerima peserta didik limpahan dari SMPN 5 Bandar Lampung karena peserta didik bina lingkungan anak kandung tenaga pendidik banyak yang mendaftar di sekolah ini.

SMPN 12 Bandar Lampung juga menerima peserta didik baru dari jalur program bina lingkungan yang dimulai dari tahun ajaran 2012/2013 dan setiap tahun masih menerima limpahan peserta didik jalur bina lingkungan dari SMPN 5 Bandar Lampung. Peserta didik jalur bina lingkungan yang nilainya tinggi dimasukkan ke kelas unggulan namun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di kelas unggulan dan peserta didik yang nilainya kurang ditempatkan di seluruh kelas berbaur dengan peserta didik dari jalur reguler. SMPN 5 Bandar Lampung berada

di sub rayon yang sama dengan SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung, setiap tahun ajaran saat penerimaan peserta didik baru selalu menerima jumlah pendaftar peserta didik jalur bina lingkungan melebihi kuota 50% dari yang ditetapkan dalam Perwali tentang bina lingkungan, sehingga banyak pendaftar yang dialihkan ke sekolah lain yang berada dalam satu sub rayon, salah satunya SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* (sengaja dan langsung ke tujuan) dengan pertimbangan kedua sekolah tersebut sudah melaksanakan program pemerintah Kota Bandar Lampung, lokasi yang berada di satu sub rayon namun memiliki strategi masing-masing dalam proses penerimaan peserta didik, strategi penempatan kelas, proses pembelajaran dan pelayanan kepada peserta didik dan telah meluluskan peserta didik, serta sampai dengan sekarang peneliti belum menemukan penelitian lain yang serupa dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau mengamati aspek-aspek yang diamati peneliti.

3.3 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada kualitatif merupakan suatu keharusan, karena penelitian ini lebih mengutamakan temuan yang ada dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri dan kedua Kepala Sekolah sebagai *key instrument*, selain melakukan wawancara, peneliti juga mengumpulkan beberapa dokumen yang relevan dan mendukung terhadap fokus penelitian ini. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, lalu bergulir ke Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengembangan Mutu,

Kepala Tata Usaha, Orang tua peserta didik bina lingkungan anak guru dan keluarga kurang mampu serta peserta didik.

Peneliti berusaha berinteraksi dengan subyek penelitian dengan tidak memaksa agar suasana tidak berubah, peneliti harus memiliki daya responsif yang tinggi, mampu merespon dan memberikan interpretasi terus-menerus pada gejala yang dihadapi. Menurut Arikunto (2010:17) Kecakapan yang harus dimiliki peneliti diantaranya :

- a) Memiliki sifat *adaptable*, yaitu mampu menyesuaikan diri, mengubah taktik atau strategi mengikuti kondisi lapangan yang dihadapi.
- b) Mempunyai kemampuan untuk memandang obyek penelitiannya secara holistik, mengaitkan gejala dengan konteks saat itu, mengaitkan dengan masa lalu dan dengan kondisi lain yang relevan.
- c) Sanggup terus menerus menambah pengetahuan untuk bekal dalam melakukan interpretasi terhadap gejala.
- d) Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi agar dengan cepat menginterpretasi. Selanjutnya peneliti juga diharapkan memiliki kemampuan menarik kesimpulan mengarah pada perolehan hasil.
- e) Memiliki kemampuan untuk mengeksplor dan merumuskan informasi sehingga menjadi bahan masukan bagi pengayaan konsep ilmu.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah untuk meningkatkan intensitas peneliti berinteraksi dengan sumber data guna mendapatkan informasi yang valid dan absah tentang fokus penelitian.

Peneliti diharapkan dapat membangun hubungan emosional dengan narasumber, membangun hubungan yang akrab, wajar dan tumbuh kepercayaan bahwa peneliti tidak menggunakan hasil penelitian untuk maksud yang salah dan merugikan orang lain ataupun lembaga yang diteliti namun lebih kepada mendapatkan informasi dan memberikan informasi tentang penerapan program penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan di kedua sekolah yang peneliti amati, peneliti berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan subyek penelitian, menghormati etika pergaulan yang telah terbangun dan menaati peraturan serta ketentuan yang berlaku dan menggunakan alat bantu untuk memperoleh data yaitu alat tulis, alat rekam, kamera dan video untuk visualisasi gambar.

3.4 Sumber Data Penelitian

Maleong (1995) mengatakan penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis pada penelitian ini adalah individu dan peseorangan. Guna memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan penelitian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| 1. Kepala Sekolah SMPN 1 Bandar Lampung | 1 orang |
| 2. Kepala Sekolah SMPN 12 Bandar Lampung | 1 orang |
| 3. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 1 Bandar Lampung | 1 orang |
| 4. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMPN 12 Bandar Lampung | 1 orang |
| 5. Wakil Kepala Bidang pengembangan Mutu SMPN 1 | 1 orang |
| 6. Guru SMPN 1 Bandar Lampung | 1 orang |
| 7. Guru SMPN 12 Bandar Lampung | 1 orang |
| 8. Orang Tua peserta didik dari program bina lingkungan | 2 orang |

- | | |
|---|---------|
| 9. Peserta didik dari program bina lingkungan | 1 orang |
| 10. Kepala Tata Usaha | 1 orang |

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:70) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi kebijakan program bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur agar peneliti leluasa menggali informasi selengkap dan sedalam mungkin dalam suasana rileks. Pertanyaan ditujukan kepada informan dengan efektif dan terarah, artinya dalam waktu yang cepat dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Sugiono (2008:72) mendefinisikan wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut, apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjarangan informasi akan diakhiri.

Pedoman wawancara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Pedoman Penelitian

No	Fokus Penelitian	indikator	Informan
1	Sistem penerimaan peserta didik baru jalur bina lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan tim kerja PPDB 2. Tata cara pendaftaran 3. Proses rekrutmen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala sekolah 2. Wakil kepala 3. Guru 4. Kepala TU
2	Strategi sekolah memenuhi kuota 50%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kuota 2. Teknis pelimpahan 3. Pembagian penempatan kelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala sekolah 2. Wakil kepala 3. Kepala TU
3	Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bina lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembelajaran peserta didik bina lingkungan di kelas 2. Minat belajar peserta didik bina lingkungan 3. Keterlibatan orang tua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru 2. Orang Tua 3. Peserta didik

2) Studi dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Perda Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

3) Observasi (pengamatan lapangan)

Pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada di lapangan.

Informan kunci dari penelitian ini adalah kepala sekolah karena mereka adalah penyusun kebijakan dan penentu kebijakan di sekolah dalam upaya strategi dalam penerimaan peserta didik baru. Informan lainnya adalah wakil kepala sekolah sebagai pelaksana tanggung jawab dari kepala sekolah, informasi yang juga diteliti adalah tata usaha (TU) sebagai tenaga kependidikan yang membantu bidang administrasi di sekolah. Selanjutnya yang menjadi informan adalah peserta didik, dimana peserta didik merupakan *primary consumer* atau pelanggan utama dari pendidikan, peserta didik adalah pihak yang merasakan langsung dari implementasi kebijakan program bina lingkungan yang di sekolah, serta orang tua peserta didik. Informasi yang diperoleh dari seluruh informan menjadi acuan sejauh mana kebijakan program bina lingkungan ini dilakukan.

Pihak berikutnya yang menjadi acuan adalah guru, guru adalah pihak pertama yang terdekat dengan peserta didik, dapat dikatakan, guru adalah aktor yang membuat sebuah sistem manajemen itu berjalan dengan baik atau tidak, apa yang dilakukan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar, bagaimana guru mampu melakukan kegiatan yang kreatif, kegiatan yang mampu membuat kenyamanan dan kepuasan pelanggan tidak terlepas dari peraturan dan kebijakan yang dibuat dan disepakati bersama dari kepala sekolah karena jumlah peserta didik yang masuk melalui jalur bina lingkungan bertambah setiap tahun penerimaan peserta didik baru dimulai.

Proses pembuatan kebijakan di sekolah tidak hanya melibatkan satu pihak satu yakni kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, namun penentu kebijakan adalah beberapa pihak yang termasuk dalam tim penerimaan peserta didik baru di sekolah. Kepala sekolah bekerjasama dengan pihak administrasi serta tim

penerimaan peserta didik baru, mereka adalah pihak-pihak yang membuat kebijakan dan membuat sistem di SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung. Penelitian dilakukan dengan cara observasi pada implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam program penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan. Wawancara dilakukan peneliti mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan proses pembagian penempatan kelas. Wawancara dilakukan peneliti dengan informan yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua dan peserta didik. Selanjutnya peneliti melakukan studi dokumentasi yang meliputi program kerja, Struktur organisasi yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah.

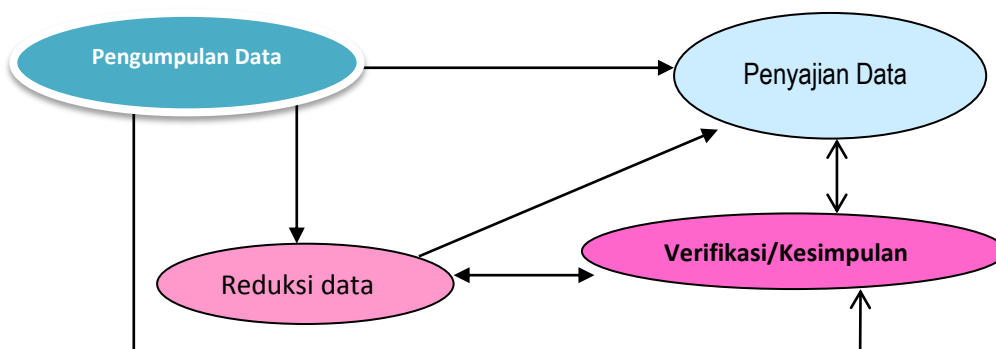
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dalam penelitian kualitatif yang berperan sebagai peneliti sekaligus pengelola penelitian, maka peneliti harus terjun langsung untuk berpartisipasi dengan mendatangi dan berinteraksi langsung untuk melakukan aktivitas yang diperlukan dimana subyek itu berada.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang telah dihimpun peneliti atau pemahaman peneliti sendiri dan untuk memungkinkan peneliti melaporkan apa yang telah ditemukan dari pihak lain. Menurut Sugiyono (2010 : 401) dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan, tapi analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles and Huberman (2013:247), teknik analisis data dilakukan secara

interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi/penarikan kesimpulan.

Gambar dibawah ini menunjukkan proses analisis yang dilakukan peneliti secara siklus bolak-balik (interaktif) selama dan setelah proses pengumpulan data. Data diperoleh, kemudian peneliti mengumpulkannya untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari proses wawancara, observasi, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data lalu penulis menyimpulkan data. Setelah menyimpulkan data, dilakukan verifikasi data dengan maksud untuk mengecek apakah ada data yang kurang atau belum didapat. Penelitian ini dilakukan sampai penarikan kesimpulan, karena penelitian ini dianggap sudah tidak lagi diperlukan pengambilan data. Teknik analisis data penulis gambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Komponen-komponen analisis data : model Interaktif

(Miles dan Huberman 2013:247)

Langkah-langkah analisis studi multi situs (diadaptasi dari Yin, 2009:61)

Studi Situs Tunggal dan Multi Situs

a. Pengertian sudi situs tunggal dan multi situs

Studi situs tunggal adalah suatu penelitian kualitatif melibatkan satu situs (tempat) dengan menganalisa beberapa permasalahan yang ada dalam situs tersebut.

Sedangkan studi multi situs *is a qualitative research approach that we designed to gain an in-depth knowledge of an organizational phenomenon that had barely been researched: strategic scanning*. Rancangan studi multi situs adalah suatu rancangan penelitian kualitatif yang melibatkan beberapa situs dan subjek penelitian. Subjek-subjek penelitian tersebut diasumsikan memiliki karakteristik yang sama, studi multi-situs merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang memang dapat digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar penelitian yang serupa, sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat ditransfer ke situasi yang lebih luas dan lebih umum cakupannya.

Pada dasarnya studi satu situs dan multi-situs mempunyai prinsip sama dengan studi kasus tunggal dan multi-kasus perbedaannya terletak pada pendekatan. Studi multi-kasus dalam mengamati suatu kasus berangkat dari kasus tunggal ke kasus-kasus berikutnya, sehingga kasus yang diteliti memiliki dua atau lebih. Penelitian dengan multi-situs menggunakan logika yang berlainan dengan pendekatan studi multi-kasus, karena arahnya lebih banyak untuk mengembangkan teori kecenderungan memiliki banyak situs daripada dua atau tiga.

Dalam pendekatan situs tunggal dan multi situs memiliki dua jenis studi, yaitu induksi analitis modifikasi dan metode komparatif konstan.

1. Induksi analitis, merupakan suatu pendekatan untuk mengumpulkan dan mengolah data maupun suatu cara untuk mengembangkan teori dan mengujinya. Prosedur induksi analitis dipergunakan apabila terdapat masalah, pertanyaan atau isu khusus yang menjadi fokus penelitian. Data dikumpulkan dan diolah untuk mengembangkan model deskripsi yang merangkum semua fenomena.

2. Metode komparatif konstan, merupakan rancangan penelitian untuk sumber multi-data yang sama dengan induksi analitis karena analisis formulanya dimulai pada awal studi dan hampir selesai pada akhir pengumpulan data. Untuk menyusun langkah-langkah dalam metode komparatif konstan guna mengembangkan teori adalah : a) mengumpulkan data. b) mencari kunci, isu peristiwa yang selalu berulang atau di dalam data yang merupakan kategori fokus. c) mengumpulkan data yang banyak memberikan kejadian (*incident*) tentang kategori fokus dengan melihat adanya keberagaman dimensi dibawah kategori-kategori yang sedang diselidiki. d) menulis kategori-kategori yang sedang diselidiki. e) mengerjakan data dan model yang muncul untuk menemukan adanya proses-proses sosial dasar . f) mendata sampling, pengkodean, dan menulis sebagai fokus analisis.

Ada dua macam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

(a) analisis data dalam situs dan (b) analisis data lintas situs

a. Analisis Data Dalam Situs

Analisis data dalam situs di dalam penelitian ini maksudnya analisis data di setiap sekolah yang dijadikan situs penelitian, karena data kualitatif terdiri dari kata-kata dan bukan angka-angka, maka analisis datanya dilakukan seperti yang dianjurkan oleh Bogdan dan Biklen, Miles dan Huberman, dan Schlegel (2013 : 249) yaitu dimulai sejak atau bersamaan dengan pengumpulan datanya dan setelah pengumpulan data selesai. Penganalisisan data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data meliputi kegiatan-kegiatan: (1) penetapan fokus penelitian apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan atau perlu ada perubahan (2) penyusunan temuan-temuan (3) pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan dari pengumpulan data sebelumnya (4) pengembangan

pertanyaan-pertanyaan analitik untuk pengumpulan data berikutnya dan (5) penetapan sasaran pengumpulan data berikutnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan untuk memikirkan peluang-peluang pengumpulan data berikutnya, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik dalam rangka penyempurnaan data yang kurang, menguji hipotesis-hipotesis dan gagasan-gagasan yang muncul selama pengumpulan data, setelah seluruh data yang diperlukan selesai dikumpulkan, semua catatan lapangan yang telah dibuat selama pengumpulan data dianalisis lebih lanjut secara lebih intensif dan seksama. Penganalisisan yang demikian itu disebut dengan analisis setelah pengumpulan data.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data setelah pengumpulan data itu sebagai berikut:

a) Pertama, dilakukan sistem kategori pengkodean. Dengan sistem ini, data penelitian dikelompokkan menurut kategori yang dibuat kemudian diidentifikasi topik-topik liputan. Setiap topik liputan dibuatkan kode yang menggambarkan topik tersebut, peneliti gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengkodean Data/Decoding

Informan yang dijadikan sumber data wawancara adalah sebagai berikut :

No	Informan	Kode
1	Kepala Sekolah SMPN 1	WKS1/19-10-2015
2	Kepala Sekolah SMPN 12	WKS12/8-3-2016
3	Waka Kesiswaan SMPN 1	WWKS1/19-10-2015
4	Waka Kurikulum SMPN 12	WWKK/8-3-2016
5	Guru 1	WG12/19-10-2015
6	Orang Tua /Guru 12	WOTG12/8-3-2016
7	Orang Tua 2	WOT12/8-3-2016
8	Peserta didik 1	WS/8-3-2016
9	Kepala Tata Usaha	WTU/8-3-2016

b) Langkah kedua dalam analisis setelah pengumpulan data adalah pengelompokan dan pemilahan data berdasarkan kode topik liputan. Setelah kode-kode tersebut dibuat lengkap dengan pembatasan operasionalnya dan dituliskan pada sebelah kiri (kolom koding) di setiap liputan yang sesuai, maka selanjutnya dilakukan pengelompokan dan pemilahan data berdasarkan kode masing-masing liputan. Pengelompokan dan pemilahan ini dilakukan dengan menggunting catatan lapangan, transkrip wawancara, dan transkrip dokumentasi berdasarkan kelompok kode yang sama, dan kemudian menempelkan kembali pada lembaran kertas berdasarkan fokus penelitian, untuk mempermudah pelacakan pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dan atau transkrip dokumentasi dan ringkasan situs sementara yang asli, sebelum dilakukan pengguntingan semua lembar data dicopy terlebih dahulu. Di samping itu, untuk memperjelas kedudukan data dan mempermudah pelacakannya pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dan atau transkrip dokumentasi, maka di bagian bawah sebelah kanan setiap satuan data tersebut diberi kode notasi.

c) Langkah ketiga dalam analisis setelah pengumpulan data adalah peringkasan atau kesimpulan data pada situs tersebut. Kesimpulan data ini disusun dan diletakkan di setiap akhir paparan data setiap sub fokus penelitian pada situs tersebut, untuk memperjelas kesimpulan data, data tersebut dilengkapi dengan pembuatan bagan tentang isi kesimpulan yang dimaksud.

d) Langkah keempat dalam analisis setelah pengumpulan data pada tiap situs penelitian adalah perumusan temuan penelitian. Temuan penelitian ini disusun dalam bentuk susunan proposisi yang bertolak dari temuan sementara pada masing-masing situs. Proposisi-proposisi ini disusun dan diletakkan pada bagian

akhir dari paparan dan kesimpulan data pada situs tersebut. Berdasarkan kesimpulan data dan proposisi - proposisi tersebut dibuatlah diagram yang menggambarkan teori yang ditemukan pada situs tersebut.

b. Analisis Data Lintas Situs

Jenis analisa ini hanya dapat digunakan pada studi multi situs. Analisis data lintas situs dimaksudkan untuk memadukan dan membandingkan temuan-temuan yang dihasilkan dari seluruh situs. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data lintas situs ini sebagai berikut :

a) Langkah pertama peneliti membuat pengelompokan situs penelitian. Misal dari tiga situs penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) situs kelompok X terdiri atas situs 1 dan situs 2, dan (2) situs kelompok Y yang terdiri atas situs 3. Pengelompokan ini didasarkan atas kesamaan karakteristik tertentu yang terlihat sebelum pengumpulan data dilakukan. Langkah kedua adalah melakukan analisis lintas situs dalam satu kelompok situs. Berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan pada masing-masing situs yang tersusun dalam bentuk proposisi-proposisi tertentu, b) Langkah kedua adalah melakukan analisis lintas kelompok situs. Temuan-temuan sementara kelompok situs X dipadukan kesamaan dan dibandingkan perbedaannya dengan temuan-temuan sementara kelompok situs Y, sehingga menghasilkan temuan-temuan lintas kelompok situs XY. Temuan-temuan lintas kelompok situs ini berupa pernyataan-pernyataan konseptual atau proposisi-proposisi lintas kelompok situs. Temuan-temuan inilah yang merupakan temuan teoritik-substantif sebagai temuan akhir penelitian. Untuk keperluan analisis data secara keseluruhan, dibuat diagram yang menggambarkan langkah-langkah mulai dari mengembangkan konsep sampai dengan analisis lintas situs.

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Maleong (2007:76) pengecekan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus mampu mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk menetapkan keabsahan data kualitatif didasarkan atas empat kriteria, yaitu :

- 1) Derajat kepercayaan (*credibility*) yang fungsinya untuk melaksanakan penyelidikan (*inquiry*), sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti.
- 2) Keteralihan (*transferibility*) merupakan validitas eksternal didasarkan pada konteks empiris seting penelitian, yaitu tentang *emic* yang diterima peneliti dan *etic* yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.
- 3) Ketergantungan (*dependability*) dilakukan untuk memeriksa akurasi pengumpulan dan analisis data, agar derajat reabilitas dapat tercapai maka diperlukan pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.
- 4) Kepastian (*comfirmability*) yaitu objektivitas yang berdasarkan pada *emic* dan *etic* sebagai tradisi kualitatif. Hal ini dapat dicapai melalui pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian.

3.8 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dikasanakan atas empat tahap, yaitu :

1) Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan ini terbagi menjadi beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, kegiatan tersebut antara lain, yaitu :

- a) Menyusun rancangan, mencari isu-isu tentang pendidikan, unik, menarik dan layak dijadikan fokus, memilih latar penelitian, menyusun rancangan penelitian,
- b) Memilih lapangan, c) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan, d) memilih dan memanfaatkan informan, e) menyiapkan perlengkapan lapangan.

Peneliti melihat dan mencermati isu pendidikan yang menjadi *trending topic* dan isu aktual di Kota Bandar Lampung, berita yang menjadi sorotan media cetak dan elektronik tentang program pemerintah Kota Bandar Lampung penerimaan peserta didik baru yang ditujukan bagi anak pendidik dan tenaga kependidikan serta keluarga kurang mampu. Melalui pengajuan judul awal Ketua Jurusan Magister Manajemen Pendidikan Bapak Irawan Suntoro, MS mengarahkan peneliti untuk berkonsultasi bersama Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Bujang Rahman, MS dan Pembimbing II Bapak Dr. Alben Ambarita, M.Pd yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, membimbing peneliti merumuskan judul penelitian kebijakan pendidikan program bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Langkah awal peneliti melalui pemilihan lokasi penelitian di SMPN 1 dan SMPN 12 Bandar Lampung, menemukan latar belakang, menentukan fokus penelitian dan mencari referensi melalui literatur untuk mencari data awal dan mempresentasikan melalui proses seminar proposal pada bulan Juli 2015 dengan penguji Bapak Dr. Sumadi, MS, kemudian dilanjutkan dengan proses penelitian di lapangan.

2) Tahap pekerjaan lapangan

Tahap ini peneliti memasuki lapangan dan berusaha untuk memenuhi pengumpulan data serta dokumen yang diperlukan dalam penelitian, data yang diperoleh dalam tahap ini dicatat dan dicermati dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dan data dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan sub fokus penelitian dan sumber datanya untuk ditarik kesimpulan. Tahap pekerjaan lapangan diawali ketika peneliti menerima surat izin penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Peneliti melakukan penelitian di SMPN 1 Bandar Lampung selama bulan September hingga Oktober 2015 dan di SMPN 12 Bandar Lampung pada bulan Maret 2016.

3) Tahap analisa data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data, dalam tahap ini peneliti menganalisis data yang telah di proses secara apa adanya, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan analisis penelitian. Kesimpulan dari tahapan analisis melalui pengumpulan data dan informasi lebih mendalam melalui observasi dokumentasi dan wawancara disajikan dalam seminar hasil penelitian pada bulan Mei 2016

4) Tahap pelaporan hasil penelitian berupa hasil penelitian yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, penyajian data penelitian, pengkajian temuan penelitian dan kesimpulan yang ditulis secara narasi dan dilanjutkan pada tahap akhir yaitu ujian tesis pada tanggal 10 Juni 2016 dengan penguji Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si, Bapak Dr. Sumadi, MS, Bapak Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si dan Bapak Dr. Alben Ambarita. Pada saat ujian tesis peneliti mendapatkan masukan berharga dan memberi inspirasi bagi peneliti untuk

mendapatkan data tambahan untuk menyempurnakan isi tesis tentang upaya pengembangan mutu dan strategi sekolah agar tesis menjadi lebih baik dengan model pengembangan hipotetik *Teacher Training in Bina Lingkungan Demand* (TT in BD).

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dilapangan, penelitian yang berjudul implementasi kebijakan pendidikan program bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung, yang pemaparannya disesuaikan dengan fokus penelitian meliputi : (1) sistem penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung; (2) strategi penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung; (3) faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program pendidikan bina lingkungan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa :

5.1.1. Sistem penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung

Perencanaan pendidikan program bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung dimulai dari pendaftaran penerimaan jalur bina lingkungan yang dilakukan terlebih dahulu waktu pendaftaran dibandingkan jalur reguler dikarenakan melalui beberapa tahapan, dalam upaya menyiapkan berdirinya secara sistematis segala kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

5.1.2 Sistem penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan di SMPN 12 Bandar Lampung

Perencanaan pendidikan program bina lingkungan di SMPN 12 Bandar Lampung dimulai dari pendaftaran penerimaan jalur bina lingkungan yang dilakukan terlebih dahulu waktu pendaftaran dibandingkan jalur reguler dikarenakan melalui beberapa tahapan, dalam upaya menyiapkan berdirinya secara sistematis segala kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan melalui Perda dan Perwali Pemerintah Kota Bandar Lampung.

5.1.3 Strategi penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan program bina lingkungan sudah berjalan, perencanaan program didukung oleh seluruh perangkat sekolah, yang membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik bina lingkungan. Selain itu dukungan juga datang dari masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan adanya peran serta orang tua, komite untuk membantu terlaksananya program bina lingkungan ini sebaik baiknya.

Pelaksanaan program sudah dilaksanakan berdasarkan apa yang telah direncanakan, dikarenakan peserta didik yang mendaftar telah melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan masing-masing sehingga sekolah menerima seluruh peserta didik melalui jalur bina lingkungan.

5.1.4 Strategi penerimaan peserta didik baru program bina lingkungan di SMPN 12 Bandar Lampung

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan program bina lingkungan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun belum memberikan solusi dalam meningkatkan mutu sekolah terutama dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik bina lingkungan. Selanjutnya pelaksanaannya baik ditinjau dari kurikulum yang digunakan, perekrutan peserta didik, tenaga didik, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti membuat perangkat pembelajaran, analisis mata pelajaran; analisis kompetensi dasar, pemetaan kompetensi dasar, materi pengayaan, alokasi waktu dan metode yang digunakan dan desain lembar kerja untuk pencapaian kompetensi sudah tersusun belum tersusun dengan baik, Untuk itu diperlukan langkah strategis dari sekolah untuk mengatasi persoalan tersebut.

5.1.5 Faktor Penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan program bina lingkungan di SMPN 1 Bandar Lampung

Faktor hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program kelas bina lingkungan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung adalah : pada saat pendaftaran pada pendidik, syarat keterangan tidak mampu dimiliki oleh semua calon pendaftar dari jalur bina lingkungan belum ada kriteria standar dan hal ini menyebabkan sekolah kurang dapat menyeleksi secara objektif karena syarat telah terpenuhi.

Pada anak didik : sulitnya adaptasi terhadap lingkungan membuat peserta didik bina lingkungan kesulitan menyesuaikan diri dengan peserta didik dari jalur umum dan reguler yang masuk ke sekolah biasa bersaing dalam memperoleh nilai, hal ini dirasakan oleh guru bidang studi yang mengajar di kelas bina lingkungan. Masih kurangnya minat belajar dan keinginan peserta didik bina lingkungan dalam menerima materi yang diberikan guru mata pelajaran di kelas kadangkala

menyulitkan guru yang mengajar di kelas. Dibutuhkan kesabaran saat menyampaikan materi ajar dan mengubah cara menyampaikan bahan ajar menjadi suatu keharusan bagi guru, hal ini menjadi penting dilakukan agar peserta didik bina lingkungan dapat lebih menyerap materi pelajaran dan meningkatkan semangat belajar.

Komunikasi yang baik dan hubungan emosional yang erat antara guru dan peserta didik harus lebih dibangun, guru di SMPN 1 Bandar Lampung selalu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif di kelas yang di dalamnya di dominasi oleh peserta didik bina lingkungan, lebih menekankan pada sikap guru yang mampu menjaga dan meningkatkan komunikasi serta hubungan emosional yang erat dengan peserta didik bina lingkungan diperlukan agar peserta didik bina lingkungan dapat menyesuaikan diri dengan peserta didik dari jalur reguler dan jalur prestasi.

5.1.6 Faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan program bina lingkungan SMPN 12 Bandar Lampung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program bina lingkungan, antara lain koordinasi antara guru mata pelajaran dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling berjalan dengan baik sehingga permasalahan yang seringkali timbul dalam kelas dapat ditangani. Faktor hambatan dalam pelaksanaan program kelas bina lingkungan di SMP Negeri 12 Bandar Lampung adalah : pada saat pendaftaran pada pendidik, syarat keterangan tidak mampu dimiliki oleh semua calon pendaftar dari jalur bina lingkungan belum ada kriteria standar dan hal ini menyebabkan sekolah kurang dapat menyeleksi secara objektif karena syarat telah terpenuhi.

Pada anak didik : sulitnya adaptasi terhadap lingkungan membuat peserta didik bina lingkungan kesulitan menyesuaikan diri dengan peserta didik dari jalur umum dan reguler yang masuk ke sekolah biasa bersaing dalam memperoleh nilai, hal ini dirasakan oleh guru bidang studi yang mengajar di kelas bina lingkungan. Masih kurangnya minat belajar dan keinginan peserta didik bina lingkungan dalam menerima materi yang diberikan guru mata pelajaran di kelas kadangkala menyulitkan guru yang mengajar di kelas. Dibutuhkan kesabaran saat menyampaikan materi ajar dan mengubah cara menyampaikan bahan ajar menjadi suatu keharusan bagi guru, agar peserta didik bina lingkungan dapat lebih menyerap materi pelajaran dan meningkatkan semangat belajar.

Komunikasi yang baik dan hubungan emosional yang erat antara guru dan peserta didik harus lebih dibangun, selalu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif pada kelas yang di dalamnya di dominasi oleh peserta didik bina lingkungan, lebih menekankan pada sikap guru yang mampu menjaga dan meningkatkan komunikasi, agar peserta didik bina lingkungan dapat menyesuaikan diri dengan peserta didik dari jalur reguler dan jalur prestasi.

5.2 Implikasi

Program pendidikan jalur bina lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung berhasil memperluas akses pendidikan di sekolah negeri, perlu dikaji lebih lanjut kaitan antara kebijakan pemerataan pendidikan dengan mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung.

5.3 Saran

5.3.1 Bagi Sekolah

Berkaitan dengan perencanaan program bina lingkungan perlu ditingkatkan lagi agar perencanaan menjadi lebih terprogram, dan perencanaan program ini mendapatkan perhatian dari pihak Dinas Pendidikan agar nantinya pada pelaksanaan tidak terjadi kesalahan, salah satunya syarat kriteria calon peserta didik bina lingkungan yang dapat diterima di sekolah.

Pelaksanaan program bina lingkungan sebagai bentuk pelayanan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu hendaknya dikelola secara lebih efektif terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mencari konsep strategi mulai dari tes, penempatan guru yang mengajar di kelas bina lingkungan dan koordinasi dan komunikasi yang baik bersama komite sekolah menjadi suatu keharusan agar komite sekolah dapat membantu sekolah dalam mengembangkan sekolah, dan menjalankan fungsinya sebagai pemberi pertimbangan, pengontrol program, mediator antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik atau masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* lain.

5.3.2 Bagi Pemerintah Daerah

Kriteria peserta didik dari keluarga kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan harus lebih selektif, seperti apa kategori keluarga kurang mampu dalam sebuah lingkungan yang layak untuk diterima dan di bantu oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga sekolah tidak lagi dipusingkan masalah mampu atau kurang mampu calon peserta didik tersebut dan memiliki kemauan dan kemampuan sehingga lebih terkonsep serta tepat sasaran, ada badan khusus yang dibentuk Pemerintah Kota Bandar Lampung yang independen dan dilakukan oleh profesional yang berintegritas dan

bertanggung jawab selain data dari Ketua RT setempat, sehingga dapat mendata akurat dalam merekomendasikan peserta didik keluarga kurang mampu sesuai dengan kondisi nyata calon peserta didik, disamping itu dengan dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung peserta didik bina lingkungan bisa lebih mengembangkan kemampuannya dengan lengkapnya fasilitas-fasilitas pendukung seperti penambahan ruang belajar di tiap jenjang pendidikan sehingga peserta didik nyaman ketika belajar dikelas.

5.3.3 Bagi Guru

Konsep mengajar melayani dengan hati adalah salah satu strategi yang dapat ditanamkan pihak sekolah kepada seluruh guru yang ada di sekolah. Sebagai pendidik dari peserta didik bina lingkungan yang mayoritas motivasi belajar rendah, selayaknya semua tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah melakukan proses pembelajaran dengan sabar dan berstandar kelayakan, menempatkan guru yang berkualitas ditempatkan di kelas bina lingkungan dapat menjadi strategi sekolah agar dapat mengejar ketertinggalan hasil belajar.

Program pendidikan bina lingkungan merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang harus diterima sekolah negeri di Kota Bandar Lampung sebagai upaya memperluas akses pendidikan terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu sehingga guru harus memperbaiki kualitas personal (kompetensi, profesionalitas, efektivitas maupun *leadership*), kualifikasi pendidikan serta relevansi pendidikannya agar dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan dan membantu sekolah dalam mempertahankan mutu sekolah negeri di Kota Bandar Lampung.

Aktivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah perlu mempertimbangkan teori pembelajaran yang dapat membuat proses belajar tidak lagi merupakan suatu yang menakutkan. Tetapi dapat menjadi syarat untuk mewujudkan perilaku yang kreatif dan perasaan bebas, karena orang yang berfikir bebas pada umumnya akan mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan sebagai langkah untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah.

5.3.4 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat pemerhati dan peneliti dunia pendidikan dapat memberikan masukan dan saran tentang program bina lingkungan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan perluasan akses pendidikan di Kota Bandar Lampung agar kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung tepat guna dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas : Jakarta
- Ambarita, Alben, 2006. *Manajemen Pembelajaran*. Depdiknas Dirjen Dikti Direktorat Ketenagakerjaan : Jakarta
- Akdon, 2007. *Strategik Management For Educational Management*. Alfabeta : Bandung
- Arikunto, Suharsimi 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara : Jakarta
- Aulia, Sitta, 2012. *Desentralisasi Kebijakan Pendidikan. Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan*. Jurnal Nasional Fisip Universitas Airlangga
- Baedowi, Tanpa Tahun. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan : Studi Kasus kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*
- Bappeda, Tanpa tahun. *Buku Arah Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Bappeda Kota Bandar Lampung* : Bandar Lampung
- Bogdan, Robert & Sari Knopp Biklen.1982. *Qualitatif Research for Education: and Introduction to Theory and Methods*.(Boston: Allyn & bacon Inc
- Danuredjo. 1977. *Otonomi Indonesia Ditinjau dalam Rangka Kedaulatan*. Laras : Jakarta
- Didin Kurniadin, Imam Machali, 2012. *Manajemen pendidikan*. AR-RUZZ Media : Jakarta
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajahmada University Press : Yogyakarta.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara, GBHN*. 1989
- Gerston, 2002. *Implementasi kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten/ Kota*

- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT.Grasindo : Jakarta
- Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Hattie, J.2013. What is the Nature of Evidence that Makes a Difference to Learning?.*Form@ re-Open Journal per la formazione in rete*, 13 (2),6-21
- Johnston, W.B&Packer ,A.E.1987.*Workforce 2000 : Work and Workers for the twenty-First Century*. Diane Publishing : Hudson Institute, Indianapolis, Indiana
- J. Salusu, 2003. *Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Rasindo : Jakarta
- K. Yin, Robert , 2009. *Studi kasus desain dan metode*. Penerjemah Mudzakir. PT.Radja Grafindo Perkasa : Jakarta
- Koesoemahatmadja, 1979. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan di Daerah di Indonesia*. Binacipta : Bandung
- Maleong, Levy J, 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya : Bandung
- Miles, BM dan Huberman dan Schleggel, 2013. *Analisis data Kualitatif*. Penerjemah Rohadi.Universitas indonesia : Jakarta
- Muhadjir, Noeng, 2003. *Metodologi penelitian dan evaluation research, Integrasi penelitian kebijakan dan perencanaan*. PT. Rake sarasin : Jogjakarta
- Mulyasa, E .2006. *Menjadi kepala sekolah profesional*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Mulyono, Abdurahman, 1995. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*.Depdikbud : Jakarta
- Nanang, Fattah, 2012. *Analisis kebijakan pendidikan*, Remaja Rosdakarya : Bandung
- Nugroho, D. Riant, 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*. PT Elex Media Computindo : Jakarta.
- Perda Kota Bandar Lampung Tahun 2012*

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013

Pongtuluran, Aris, 1995. *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. LPMP : Jakarta

Rabin *et.al* , 2000. *Handbook Of Strategik Manajement*. New York

Rahman, B , 2010. *Manajemen Mutu Akademik Untuk meningkatkan Produktivitas Kelembagaan* (Disertasi). Universitas Pendidikan Indonesia : Bandung

Rahman, B.2013. *Manajemen Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan : Teori dan Praktek Melejitkan Produktivitas*. Graha Ilmu.Yogyakarta

Saleh, Syarif, 1963. *Otonomi dan Daerah Otonom*. Penerbit Endang : Jakarta

Sihombing, Umberto dan Indarjo, 2003. *Pembiayaan Pendidikan*. ISBN

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta : Bandung

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan.Pendekatan Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Sugiyono, 2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Alfabeta : Bandung

Suryono, Yoyon, 2000. *Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. FKIP UNY : Yogyakarta

Susanti Gita dan Supardi Anugrah, 2014. *Studi Implementasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Tana Toraja*. Jurnal Nasional FISIP Makasar

Setiawan Eko dan Hayat Ainul, 2012. *Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan. Studi Tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Dalam Peraturan Walikota Surakarta No.11 A Tahun 2012*. Jurnal Nasional Universitas Brawijaya, Malang

Syafaruddin, 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Rineka. Jakarta

Tim Dosen UPI, 2008. *Manajemen Pendidikan*. Alfabeta Bandung

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2009. *Manajemen Pendidikan*. Alfabeta Bandung

Thomas R. Dye, 1992. *Understanding Public Policy*, Prentise Hall, USA

Umeh, O.J. 2008. *The Role of Human Resource Management in Successful National Development and Governance Strategies in Africa and Asia*. *Public Administration Review*, 68(5),984-950

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 2003. Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3, Sistem Pendidikan Nasional

Wayong J, 1979. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Djambatan : Jakarta.